KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan izinnya RENSTRA Dinas Kebudayaan Provins Riau Tahun 2017-2019 telah dapat disusun sesuai dengan ketentuan.

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau resmi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah No.4 Tahun 2016, sebelumnya bernama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Riau

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau merupakan Organisasi Perangkat Daerah baru sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) sebagai salah satu Dokumen Perencanaan perlu secepatnya disusun. Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau adalah Renstra untuk periode 2017-2019.

Renstra digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan kebudayaan yang hendak dicapai pada periode 2017—2019, serta merupakan dasar dan acuan bagi bidang-bidang dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, dan SKPD di kabupaten/kota untuk menyusun (1) Rencana Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-; (3) Rencana/Program Pembangunan lintas sektoral bidang Kebudayaan; (4) Koordinasi perencanaan dan pengendalian kegiatan Kebudayaan; (5) Laporan Tahunan; dan (6) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Demikian Renstra ini disusun dengan harapan Renstra ini dapat dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh jajaran Dinas Kebudayaan dan para pemangku kepentingan dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan pembangunan bidang kebudayaan secara efisien, efektif, terintegrasi, sinergis dan berkesinambungan.

Pekanbaru, 2018

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

YOSERIZAL ZEN
Pembina Utama Muda
NIP. 19681107 199503 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR……..……..... i

DAFTAR ISI…….……..... ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang …..... 1

1.2 Landasan Hukum …..... 4

1.3 Maksud dan Tujuan…..... 6

1.4 Sistematika Penulisan…..... 6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau …..... 12

2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau …….. 18

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau…… 19

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau …….…….…… 22

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau…….. 26

3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih…… 28

3.3 Telaah Renstra K/L dan Renstra Dirjen Kebudayaan…….. 30

3.4 Telaah RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis…… 32

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis…… 38

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau …….. 47

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau ……..……... 51

5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Kebudayaan ……. 54

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ……. 60

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG KEBUDAYAAN …… 79

BAB VIII PENUTUP …….…….. 82

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1	Kondisi Sumber Daya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin	18
TABEL 2.2	Klasifikasi Pegawai menurut Eselon	18
TABEL 2.3	Klasifikasi Pegawai menurut Golongan	18
TABEL 2.4	Klasifikasi Pegawai menurut Pendidikan Formal	19
TABEL T-C23	Capaian Kinerja Layanan Kebudayaan Tahun 2014-2018	20
TABEL T-C24	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kebudayaan	21
TABEL 3.5	Matrik Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi	45
TABEL T-C.25	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Kebudayaan	50
TABEL 5.1	Rumusan Strategi Umum	52
TABEL 5.2	Keterkaitan Strategi Umum dengan Arah Kebijakan	55
TABEL T-C.26	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	59
TABEL 6.1	Program dan Bidang/UPT Pelaksana	63
TABEL T-C.27	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	71
TABEL T-C.28	Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan yang Mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD	81

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebudayaan Nasional menurut TAP MPR No. II Tahun 1998 Kebudayaan nasional yang berlandaskan Pancasila adalah perwujudan cipta, karya dan karsa bangsa Indonesia dan merupakan keseluruhan daya upaya manusia Indonesia untuk mengembangkan harkat dan martabat sebagai bangsa, serta diarahkan untuk memberikan wawasan dan makna pada pembangunan nasional dalam segenap bidang kehidupan bangsa. Dengan demikian Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berbudaya

Kebudayaan Melayu merupakan kebudayaan secara turun-temurun dilakukan oleh masyarakat, Kebudayaan Melayu merupakan salah satu pilar penopang kebudayaan nasional Indonesia khususnya dan kebudayaan dunia umumnya, di samping aneka budaya lainnya. Budaya Melayu tumbuh subur dan kental di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Melayu yang identik dengan agama, bahasa, dan adat-istiadat merupakan integritas yang solid, adat Melayu merupakan konsep yang menjelaskan satu keseluruhan cara hidup Melayu di alam Melayu. Orang Melayu di mana juga berada akan menyebut fenomena budaya mereka sebagai “ini adat kaum” masyarakat Melayu mengatur kehidupan mereka dengan adat agar setiap anggota adat hidup beradat, seperti adat alam, hukum adat, adat beraja, adat bernegeri, adat berkampung, adat memerintah, adat berlaki-bini, adat bercakap, dan sebagainya. Adat adalah fenomena keserumpunan yang mendasari kebudayaan Melayu.

Dahulu Melayu merupakan kerajaan-kerajaan yang berada di kawasan Nusantara. Seorang raja harus memegang teguh adat Melayu dalam menjalakan kekuasaannya terhadap rakyatnya menyatakan :

Pembangunan dan pelestarian kebudayaan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

bidang kebudayaan dan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kebudayaan Provinsi Riau adalah merupakan penjabaran dari Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019, ini sesuai dengan tahapan dan skala prioritas RPJMD pada pentahapan ke-3 Perubahan RPJPD Provinsi Riau tahun 2005-2025 yaitu :

1. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada bidang pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dan masyarakat;

2. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada bidang pengembangan pusat-pusat kegiatan ekonomi dan pembangunan ekonomi berbasis potensi lokal dan masyarakat;

3. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada bidang peningkatan sumberdaya manusia yang berkualitas;

4. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada bidang **pembangunan nilai dan budaya Melayu yang agamis;**

5. Memantapkan pembangunan secara menyeluruh pada bidang peningkatan tata kelola pemerintahan melalui penguatan reformasi birokrasi yang didukung dengan penerapan sistem informasi yang handal.

Hal tersebut secara lebih khusus memuat tentang kebudayaan dan sekaligus berfungsi sebagai pedoman penyusunan perencanaan tahunan di bidang kebudayaan

Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 merupakan dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Disamping itu Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 merupakan tolak ukur penilaian kinerja Perangkat Daerah.

Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2014-2019 disusun berdasarkan atas Perubahan RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 khususnya bidang kebudayaan. Selanjutnya Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau akan menjadi acuan dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Gambar 1. Keterkaitan Renstra Dengan Dokumen Perencanaan

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Rencana Strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 2014-2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah Swatantra I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Tahun 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah provinsi riau
16. Peraturan Gubernur No. 82 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
17. Peraturan Gubernur Riau Nomor 109 tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau dan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
18. Peraturan Gubernur Riau Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penetapan Indikator Kinerja Program Pembangunan Provinsi Riau
19. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud Penyusunan Renstra Dinas Kebudaayaan Provinsi Riau Tahun 2017-2018 adalah untuk :

1. Menjabarkan visi,misi dan program/kegiatan Perangkat Daerah ke dalam rencana program/kegiatan periode 5 (lima) tahun yang sifatnya indikatif;
2. Menjabarkan kebijakan program/kegiatan jangka panjang Perangkat Daerah;
3. Mensinergikan dan menyelaraskan kebijakan program/kegiatan baik ditingkat pusat maupun di daerah, serta aspirasi masyarakat.

1.3.2. TUJUAN

Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2017-2018 adalah :

1. Pedoman acuan resmi dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah sekaligus acuan penentuan pilihan-pilihan program/kegiatan tahunan;
2. Memudahkan seluruh jajaran Perangkat Daerah untuk memahami dalam menentukan program/kegiatan yang nantinya diukur dengan indikator-indikator dan target kinerja;
3. Menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi, dan sinergi baik antar fungsi Perangkat Daerah maupun antara Pusat dan Daerah
4. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis (Renstra) ini terdiri dari 6 Bab dengan sistem penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pada bagian ini dikemukakan secara ringkas pengertian Renstra Perangkat Daerah, fungsi Renstra Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra, keterkaitan Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra kementerian dan Renstra Provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah

1.2. Dasar Hukum

Pada bagian ini memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan penyusunan dan penganggaran Perangkat Daerah

1.3. Maksud dan Tujuan

Pada bagian ini memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra

1.4. Sistematika Penulisan

Pada bagian ini memuat uraian tentang pokok bahasan dalam penulisan Renstra Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam penyelengggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capai-capain penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas Perangkat Daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Perangkat Daerah ini.

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Memuat penjelasan umum tentang dasar hokum pembentukan Perangkat Daerah, struktur Organisasi Perangkat Daerah, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala Perangkat Daerah, uraian tentang struktur organisasi Perangkat Daerah ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil dan tata laksana Perangkat Daerah (proses, prosedur, mekanisme)

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Pada bagian ini menjelasan secara ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal dan unit usaha operasional

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini menjelaskan tingkat capaian kinerja Perangkat Daerah berdasakan sasaran/target Renstra Perangkat Daerah periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib dan/atau indikator kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan atau indikator lainnya seperti MDG's atau indicator yang telah diratifikasi oleh pemerintah, Adapun table yang perlu disajikan adalah pengisian Tabel-C.23 dan Tabel C.24.

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap renstra Kementerian dan renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap KLHS yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan Perangkat Daerah beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Identifikasi permasalahan didasarkan pada hasil pengisian Tabel T-B.35

3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah Terpilih

Pada bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang terkait dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih.Selanjutnya berdasarkan Identifikasi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah (Tabel- T-B.35), dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai salah satu bahan perumusan isu strategis Pelayanan Perangkat Daerah.

3.3. Telaah Renstra Kementerian dan Renstra Kab/Kota

Pada bagian ini dikemukakan faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mepengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementerian dan Renstra kabupaten/kota

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada bagian ini dikemukakan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Pada bagian ini mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan Perangkat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari: 1) gambaran pelayanan Perangkat Daerah; 2) sasaran

jangka menengah pada Renstra Kementerian; 3) Sasaran jangka menengah dari Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota. 4) Implikasi RTRW bagi Pelayanan Perangkat Daerah; dan 5) Implikasi KLHS bagi pelayanan Perangkat Daerah. Selanjutnya dikemukakan juga metode penentuan isu-isu strategis dan hasil penentuan isu-isu strategis yang akan ditangani melalui Renstra Perangkat Daerah periode tahun 2014-2019.

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudyaan. Pernyataan tujuan dan sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah beserta Indikator Kinerjanya yang disajikan dalam Tabel T-C.25

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bagian ini mengemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yaitu Tabel T-C.26 yang dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode berkenan dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakn Perangkat Daerah, jika terdapat pernyataan strategi atau arah kebijakan yang tidak relevan dan tidak konsisten dengan pernyataan lainnya, maka diperlukan perbaikan dalam proses perumusan strategi dan arah kebijan tersebut.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang penyajiannya menggunakan Tabel 6.1 bersumber dari Tabel T-C.27

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada Bab ini mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen

untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 yang bersumber dari Tabel T-C.28

BAB VII PENUTUP

Pada Bab ini dikemukakan secara ringkas seluruh bagian dari Renstra dan beberapa harapan yang mendukung implementasi dari Renstra ini

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

Pada bagian ini akan disajikan gambaran layanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dan diuraikan beberapa hal terkait dengan tugas, fungsi dan struktur organisasi, kondisi sumberdaya, kinerja pelayanan, tantangan dan peluang pengembangan Dinas Kebudayaan.

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Peraturan Gubernur Riau Nomor 82 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, kedudukan Dinas Kebudayaan merupakan salah satu SKPD yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, saat ini memiliki susunan organisasi tata kerja terdiri dari:

1. Kepala Dinas Kebudayaan
2. Sekretariat
3. Bidang Bahasa dan Seni
4. Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya
5. Bidang Sejarah dan Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
6. Bidang Rekayasa Budaya
7. Unit Pelaksana Teknis (UPT)

Tugas dan fungsi dari masing-masing bidang tersebut diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mempunyai tugas membantu Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang kebudayaan. Dalam pelaksanaan tugas pokok tersebut diatas, Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Riau mengemban fungsi :

1) Perumusan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang

Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dan Bidang Rekayasa Budaya

2) Pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Bahasa dan Seni, Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya, Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, dan Bidang Rekayasa Budaya
3) Pengkoordinasian pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas manajerial dan teknis
4) Pelaksanaan tugas lain sesuai tugas dan fungsinya

2. Sekretariat Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Sekretariat Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dipimpin oleh seorang Sekretaris, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Sub Bagian Perencaaan Program, Sub Bagian Keuangan, Perelengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum.

Untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana tersebut diatas, Sekretaris mempunyai fungsi :

1) Penyusunan Program Kerja dan Rencana Operasional pada Sekretariat;
2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat;
3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kebudayaan dan;
4) Pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretaris Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dibantu 3 (tiga) Kepala Sub Bagian yaitu:

a. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program
b. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
c. Kepala Sub Bagian Keuangan, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.

3. Bidang Bahasa dan Seni

Bidang Bahasa dan Seni dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan koordinasi fasilitasi dan evalasi pada Seksi Bahasa dan Sastra, Seksi Kesenian dan Seksi Perfilman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana teresebut diatas, Kepala Bidang Bahasa dan Seni menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada pada Bidang Bahasa dan Seni'
2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lilngkungan Bidang Bahasa dan Seni;
3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan ke[ada Kepala Dinas Kebudayaan; dan
4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Bahasa dan Seni dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu:

a. Kepala Seksi Bahasa dan Sastra
b. Kepala Seksi Kesenian
c. Kepala Seksi Perfilman

4. Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya

Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas m e l a k u k a n koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Pelestarian Adat dan Tradisi, Seksi Nilai Budaya, Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana teresebut diatas, Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada pada Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya

2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lilngkungan Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya;

3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan ke[ada Kepala Dinas Kebudayaan; dan

4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut diatas, Kepala Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu :

a. Kepala Seksi Pelestarian Adat dan Tradisi

b. Kepala Seksi Nilai Budaya

c. Kepala Seksi Inventarisasi dan Dokumentasi Budaya

5. Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman

Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Sejarah, Seksi Pelestarian Cagar Budaya, Seksi Permuseuman.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana teresebut diatas, Kepala Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada pada Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;

2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lilngkungan Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;

3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kebudayaan; dan

4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu :

a. Kepala Seksi Sejarah

b. Kepala Seksi Pelestarian Cagar Budaya

c. Kepala Seksi Permuseuman

6. Bidang Rekayasa Budaya

Bidang Rekayasa Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi tugas pada Seksi Diplomasi Budaya, Seksi Pengembangan Teknologi Budaya, Seksi Publikasi Budaya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana teresebut diatas, Kepala Bidang Rekayasa Budaya menyelenggarakan fungsi :

1) Penyusunan program kerja dan rencana operasional pada pada Bidang Rekayasa Budaya;
2) Penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lilngkungan Bidang Rekayasa Budaya;
3) Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Dinas Kebudayaan; dan
4) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas-tugas Kepala Bidang Bidang Rekayasa Budaya dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi yaitu :

a. Kepala Seksi Diplomasi Budaya

b. Kepala Seksi Pengembangan Teknologi Budaya

c. Kepala Seksi Publikasi Budaya

Adapun Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1 : Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan

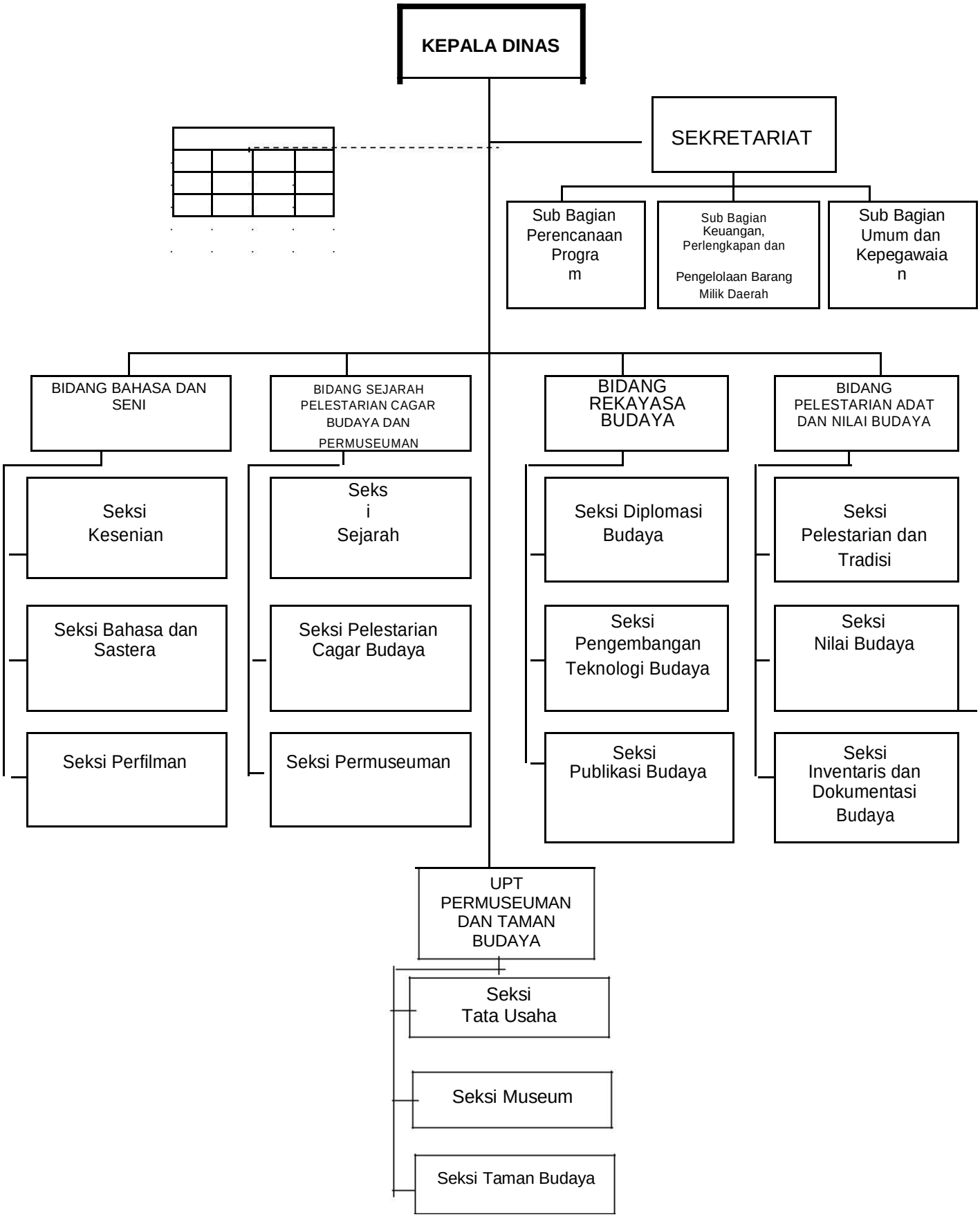

2.2 Sumber Daya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Tabel 2.1 Kondisi Sumberdaya Manusia berdasarkan Jenis Kelamin

NO	UNIT KERJA	LAKI – LAKI	PEREMPUAN
1	Dinas Kebudayaan Provinsi Riau	44	34
JUMLAH		44	34

Tabel 2.2. Klasifikasi Pegawai menurut Eselon

NO	JENIS KELAMIN	ESELON				JUMLAH
		I	II	III	IV	
1	Laki-laki	-	1	2	10	**13**
2	Perempuan	-	-	4	7	**11**
JUMLAH		**-**	**1**	**6**	**17**	**24**

Tabel 2.3. Klasifikasi Pegawai menurut Golongan

NO	JENIS KELAMIN	Golongan			
		I	II	III	IV
1	Laki-laki	1	6	26	**9**
2	Perempuan	0	2	27	**7**
JUMLAH		1	**8**	**53**	**16**

Tabel 2.4 Klasifikasi Pegawai menurut Pendidikan Formal

NO	JENIS KELAMIN	Pendidikan Formal								JUMLAH
		SD	SLTP	SLTA	DII	DIII	S1	S2	S3	
1	Laki-laki	1	0	12	0	0	22	7	0	42
2	Perempuan		0	8	0	2	19	7	0	36
JUMLAH		1	0	20	0	2	41	14	0	78

2.2.1 Asset/Modal Sarana dan Prasarana

Saat ini kantor Dinas Kebudayaan Provinsi Riau terletak di Jalan Jendral Sudirman No.194 Pekanbaru, selain itu Dinas Kebudayaan juga memiliki beberapa gedung yang diperuntukkan bagi kantor Unit Pelaksana Teknis, antara lain adalah kantor UPT Taman Budaya dan kantor UPT Museum Daerah. Sarana dan prasarana yang dimiliki baik dikantor pusat maupun di UPT masih belum memadai untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang ada dalam struktur organisasi dan tata kerja.

Keterbatasan sarana dan prasarana inilah yang menjadi kendala dalam melaksanakan administrasi perkantoran dan program/kegiatan dibawah kendali Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Sarana dan prasarana yang saat ini sangat dibutuhkan adalah Perangkat Komputer dan kelengkapannya.

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Dalam rangka mempercepat usaha pembangunan kebudayaan, Pemerintah Provinsi Riau dalam hal ini Dinas Kebudayaan akan

melakukan usaha maksimal untuk mengejar ketertinggalan dari daerah-daerah lain. Dimulai dengan penyediaan sarana infrastruktur kebudayaan, ketersediaan tenaga serta program-program pendukung lainnya.

Tabel 2.5 Capaian Kinerja Layanan Kebudayaan Tahun 2014 - 2018

2.3.1. Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan

Dalam rangka mempertahankan jati diri bangsa dan pengembangan toleransi terhadap keragaman budaya melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dan penyerapan nilai-nilai universal dilakukan untuk menghadapi beberapa permasalahan utama sebagai berikut: a) lemahnya kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya; b) terjadinya krisis jati diri (identitas) nasional; dan c) kurangnya kemampuan bangsa dalam mengelola kekayaan budaya yang bersifat fisik/benda *(tangible)* dan yang bukan bersifat fisik/tak benda *(intangible).*

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dilaksanakan penguatan jati diri bangsa dan pelestarian budaya yang dilakukan melalui empat fokus prioritas yaitu penguatan jati diri dan karakter bangsa yang berbasis pada keragaman budaya, peningkatan apresiasi terhadap keragaman serta kreativitas seni dan budaya, peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya, serta pengembangan sumber daya budaya.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Pembangunan kebudayaan diarahkan untuk membangun dan memperkuat jati diri, bangsa dalam kerangka multikultur, membutuhkan pembinaan secara cermat dan penuh kesungguhan agar dapat menjadi kekuatan pemersatu. Peran strategis pembangunan kebudayaan semakin dibutuhkan dalam upaya membangun identitas bangsa. Untuk itu pembangunan kebudayaan terus dibina dengan menanamkan nilai-nilai budaya yang dapat membentuk pola pikir masyarakat yang berorientasi pada kebersamaan, kerjasama serta kecintaan kepada tanah air dan bangsa dalam menjalankan kehidupan didalam masyarakat.

Pembangunan kebudayaan dilakukan untuk mewujudkan Provinsi Riau sebagai Keragaman kebudayaan dan tradisi telah menjadikan Provinsi Riau sebagai provinsi yang kaya dengan berbagai bentuk dan dimensi kebudayaan termasuk kesenian dan pengetahuan tradisional,

seperti seni rupa, seni pertunjukan dan upacara tradisional. Keragaman seni, budaya, dan tradisi yang merupakan hasil karya budaya ini perlu untuk dipelihara, dilindungi dan dikembangkan serta dilestarikan oleh masyarakat. Pengembangan seni, budaya, dan tradisi memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan apresiasi masyarakat dari generasi ke generasi terhadap keragaman budaya, yang adaptif terhadap pengaruh budaya global yang positif untuk kemajuan. Sesuai dengan perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat, peningkatan apresiasi dan penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat menghadapi kendala, antara lain terbatasnya sarana dan prasarana kesenian, seperti galeri, taman budaya dan gedung kesenian.

Pembangunan kebudayaan diwujudkan melalui penegakan, penguatan dan pengembangan 7 (tujuh) pilar yaitu (1) Hak Berkebudayaan; (2) Jati Diri, Karakter Bangsa dan Multikulturalisme; (3) Sejarah dan warisan Budaya, (4) Kesenian dan Industri Budaya, (5) Diplomasi Budaya, (6) Pranata dan SDM Kebudayaan, dan (7) Sarana dan Prasarana Kebudayaan.

Keberhasilan pembangunan kebudayaan juga dipengaruhi oleh dukungan sumberdaya yang memadai seperti sumberdaya manusia, sarana dan prasarana, termasuk ketersediaan fasilitas informasi dan teknologi yang sesuai dengan perkembangan zaman, kelembagaan, pendanaan, kemitraan, serta penelitian dan pengembangan. Oleh karena itu, sumberdaya kebudayaan perlu dikembangkan secara berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, pengembangan sumberdaya kebudayaan menghadapi beberapa permasalahan antara lain adalah :

a. Terbatasnya sumber daya manusia di bidang kebudayaan yang berkualitas;
b. Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan;
c. Terbatasnya sarana dan prasarana di bidang kebudayaan;
d. Terbatasnya dukungan peraturan perundangan kebudayaan;
e. Terbatasnya kemampuan pendanaan; serta
f. Belum optimalnya koordinasi antar instansi, serta belum optimalnya kerjasama antar pihak, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

Tujuan pembangunan kebudayaan secara umum adalah untuk meningkatkan kontribusi kebudayaan, penyerapan tenaga kerja dan pemerataan

pembangunan.

Dalam meningkatkan pelayanan, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dihadapkan kepada peluang dan tantangan. Adapun peluang-peluangnya antara lain :

1. Potensi keanekaragaman warisan dan kekayaan kebudayaan yang dimiliki;
2. Tingkat keanekaragaman cagar budaya yang tinggi baik yang berasal dari kelompok masyarakat maupun keanekaragaman dalam konteks peradaban, tradisional hingga modern dan kewilayahan;
3. Jumlah pengunjung museum yang meningkat;
4. Perkembangan kesenian dalam kehidupan masyarakat meningkat baik seni rupa, seni pertunjukan, seni sastera, seni musik dan seni media rekam dan film serta seni desain;
5. Potensi nilai budaya di Provinsi Riau sangat tinggi ;
6. Dukungan pemerintah dalam pengembangan nilai-nilai budaya di Provinsi Riau;

Sementara itu tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan kebudayaan antara lain :

1. Investasi belum berorientasi pada pemberdayaan sumberdaya lokal;
2. Masuknya pengaruh negatif kebudayaan asing yang berkembang di masyarakat;
3. Infrastruktur dan fasilitas kebudayaan kurang mendukung;
4. Belum optimalnya dukungan masyarakat, pelaku kebudayaan dalam pembangunan kebudayaan;
5. Kecenderungan terhadap berkembangnya isu keamanan, kesehatan lingkungan, ekonomi, sosial, budaya dan bencana alam;
6. Belum optimal sinergitas eksekutif dan legislatif dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan kebudayaan.

Dalam meningkatkan pembangunan Kebudayaan Provinsi Riau pada tataran nasional, harus pula memperhatikan *positioning* daerah pesaing lain sebagai input bagi pengembangan kebudayaan daerah. Provinsi Riau yang secara administratif berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Jambi dan Provinsi Kepulauan Riau seyogyanya memperhatikan pula

perkembangan kebudayaan di 4 (empat) Provinsi tersebut. Hal ini dimaksudkan sebagai upaya meningkatkan kualitas perencanaan dalam penetapan strategi dan kebijakan untuk pelaksanaan pembangunan di bidang kebudayaan.

Pembangunan kebudayaan sangat dipengaruhi oleh kondisi eksternal seperti sosial budaya, ekonomi, teknologi, dan politik. Beberapa pengaruh kondisi eksternal terhadap kebudayaan yang merupakan tantangan dan peluang dalam pengembangan layanan kebudayaan dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1 Sosial, Budaya dan Lingkungan

Kondisi sosial, budaya dan lingkungan yang mempengaruhi pembangunan kebudayaan dalam kurun waktu dua tahun mendatang antara lain seperti berikut ini:

1. Bonus Demografi

   Bonus demografi akan diikuti dengan dampak sosial maupun ekonomi yang salah satunya merupakan dampak utama yakni angka ketergantungan penduduk, yaitu tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif (usia tua dan anak-anak) akan sangat rendah, diperkirakan mencapai 44 per 100 penduduk produktif. Peluang bonus demografi ini diharapkan jumlah penduduk produktif tidak banyak menanggung beban atas penduduk yang tidak produktif, dan dalam perspektif akhirnya selisih jumlah subsidi yang semakin kecil akan memberikan dampak kemandirian secara ekonomis yang mampu dimanfaatkan untuk sektor lain.

   Uraian tersebut di atas akan menjadi terbalik dan merupakan bencana bagi negara manakala bonus demografi tidak mampu dimanfaatkan sebagai peluang, karena jumlah penduduk yang besar dan dalam usia produktif namun tidak mampu terserap dalam dunia kerja akibat terbatasnya lapangan kerja dan rendahnya kompetensi. Hal yang paling utama harus dilakukan oleh pemerintah dengan kondisi tersebut adalah memberdayakan semua potensi yang ada, mempersiapkan rencana pembangunan yang diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja guna menampung penduduk usia produktif pada saat terjadinya bonus demografi tersebut.

3. Perubahan gaya hidup yang konsumtif dan rendahnya kesadaran masyarakat yang berpotensi menurunkan kualitas lingkungan;
4. Adanya ketidak seimbangan sistem lingkungan akibat pencemaran oleh industri, pertanian, dan rumah tangga;
5. Masih rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang dapat menjadi alternatif sumber daya termasuk penelitian-penelitian yang dapat berpotensi menghasilkan Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
6. Masih rendahnya kualitas SDM Riau pada khususnya dan Indonesia pada umumnya untuk bersaing di era ekonomi berbasis pengetahuan *(Knowledge-Based Economy)*.

2.4.2 Ekonomi

Kondisi ekonomi yang mempengaruhi pembangunan kebudayaan dalam kurun waktu dua tahun mendatang antara lain adalah:

1. Tingginya angka kemiskinan dan pengangguran;
2. Masih adanya kesenjangan pertumbuhan ekonomi antar wilayah;
3. Masih banyak basis kekuatan ekonomi yang mengandalkan upah tenaga kerja yang murah dan ekspor bahan mentah dari eksploitasi sumber daya alam tak terbarukan;
4. Semakin meningkatnya daya saing Indonesia yang perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan tenaga kerja;
5. Munculnya ancaman raksasa ekonomi global seperti Cina dan India dan semakin luasnya perdagangan bebas yang mengancam daya saing perekonomian nasional;
6. Masih rendahnya optimalisasi pendayagunaan sumber daya ekonomi yang berasal dari sumber daya alam;
7. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif tinggi, baik yang sudah berjalan maupun yang direncanakan, perlu didukung dengan penyiapan tenaga kerja yang memadai; dan
8. Ancaman masuknya tenaga terampil menengah dan tenaga ahli dari negara lain; serta tingkat pertumbuhan ekonomi.

Dinamika global ditandai dengan berbagai perubahhan penting secara politik, ekonomi, sosial dan budaya. Dalam konteks perekonomian global, telah terjadi pergeseran peran sector dalam menggerakkan perekonomian dunia, yang diawali dengan gelombang pertama adalah era pertanian, disusul era industry, kemudian era informasi dan pada abad ini era industry yang berbasis potensi/asset budaya menjadi salah satu kekuatan penting dalam menggerakkan ekonomi lokal dan global melalui inovasi dan kreatifitas

2.4.3 Teknologi

Kondisi teknologi yang mempengaruhi pembangunan kebudayaan dalam kurun waktu lima tahun mendatang antara lain adalah:

1. Kesenjangan literasi (kemampuan) teknologi informasi dan komunikasi antar kabupaten/kota;
2. Kebutuhan akan penguasaan dan penerapan iptek dalam rangka menghadapi tuntutan global;
3. Semakin meningkatnya kebutuhan untuk melakukan berbagi pengetahuan dengan memanfaatkan TIK;
4. Perkembangan internet yang menghilangkan batas wilayah dan waktu untuk melakukan komunikasi dan akses terhadap informasi;
5. Perkembangan internet yang membawa dampak negatif terhadap nilai dan norma masyarakat serta memberikan peluang munculnya plagiarisme dan pelanggaran HAKI.

2.4.4 Politik, Pertahanan dan Keamanan

Kondisi politik, pertahanan dan keamanan yang mempengaruhi pembangunan kebudayaan dalam kurun waktu dua tahun mendatang antara lain adalah:

1. Ketidakstabilan politik serta pertahanan dan keamanan yang mengancam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
2. Implementasi otonomi daerah yang mendorong kemandirian dan berkembangnya kearifan lokal;
3. Terjadinya penyimpangan penyimpangan dalam implementasi otonomi daerah;

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN PROVINSI RIAU

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Kebudayaan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Kebudayaan Provinsi Riau serta berdasarkan pada beberapa aspek kajian, kondisi saat ini, standar pencapaian yang digunakan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi baik internal maupun eksternal, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan dan isu strategis yang dikelompokkan dalam aspek kebudayaan. Selain itu, permasalahan dikelompokkan sesuai dengan bidang yang ada dalam struktur organisasi, dikelompokkan menjadi lima bidang yaitu:

1. Bidang Bahasa dan Seni;
2. Bidang Pelestarian Adat dan Nilai Budaya;
3. Bidang Rekayasa Budaya;
4. Bidang Sejarah, Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman;
5. UPT Taman Budaya dan Museum;

Secara rinci permasalahan tersebut dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Permasalahan Kebudayaan

   Permasalahan yang dihadapi Dinas Kebudayaan adalah belum optimalnya pelestarian dan pengelolaan Kebudayaan hal ini disebabkan karena:

   1) Derasnya arus globalisasi
   2) Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi
   3) Belum optimalnya penerapan nilai-nilai budaya
   5) Kurangnya apresiasi/peran masyarakat dalam pembinaan karakter dan budi pekerti
   7) Kurangnya sarana dan prasana pelestarian budaya
   8) Jumlah dan kualitas sumberdaya manusia bidang kebudayaan belum memadai

1. **Pelestarian Warisan Budaya dan Sejarah Belum Optimal**

Masih banyaknya warisan budaya dan sejarah yang hilang, dicuri dan diakui oleh pihak lain, hal ini merupakan gejala minimnya peran pemerintah dalam melindungi dan melestarikan warisan budaya dan sejarah

Basis Data dalam hal warisan budaya dan sejarah yang belum jelas membuat pemerintah provinsi kesulitan dalam mengelola seluruh warisan budaya dan sejarah.

2. **Hilang dan Memudarnya Karakter Budaya Melayu sebagai Jati Diri.**

Dengan perkembangan teknologi informasi yang bergerak cepat, memiliki dampak positif dan negatif bagi kehidupan berbudaya. Dunia seakan tanpa batas segala sesuatu dapat diakses dengan mudahnya, sering kali kemudahan tersebut memudarkan pemahaman nilai-nilai luhur budaya, sehingga kita tidak mampu lagi memfilter dan memilah mana yang budaya jati diri bangsa dan mana budaya asing.

3. **Promosi, Diplomasi dan dan Pertukaran Budaya yang belum optimal.**

Untuk menuju promosi, diplomasi dan pertukaran budaya ada beberapa permasalahan yang dihadapi yaitu :

a. Terbatasnya pengetahuan masyarakat akan kekayaan budaya yang menyebabkan apresiasi tentang budaya masih sangat terbatas, dalam hal ini diplomasi–diplomasi kebudayaan sangat dibutuhkan untuk pengembangan kebudayaan ke luar negeri
b. Terbatasnya pengetahuan masyarakat terhadap kekayaan budaya antar daerah sehingga peran promosi sangat diperlukan.
c. Belum adanya sertifikasi sebagai bukti keahlian pelaku budaya yang mengakibatkatkan terbatasnya pelaku budaya dapat ikut serta dalam even-even budaya yang bersifat internasional.

4. **Peran Pelaku Budaya dalam melestarikan Kebudayaan**

   Ketergantungan melestarikan kebudayaan masih membutuhkan peran dan bantuan dari pemerintah, inisiasi pelaku budaya belum tersinergi masih dilakukan secara sendiri, di sisi lain pemerintah juga belum optimal dalam melibatkan para pelaku budaya tersebut.

Tabel T-B.35

Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Pendaftaran HAKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual) terhadap Karya Cipta Seni Budaya Melayu.	Untuk bisa menjadi HAKI suatu Karya Cipta Seni Budaya Melayu membutuhkan waktu yang sangat lama yaitu antara 4 s/d 18 bulan	Proses dari pendaftaran HAKI menjadi HAKI pada suatu Karya Cipta Seni Budaya Melayu

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Gubernur Riau

3.2.1 Telaah Visi, Misi

Berdasarkan Revisi RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019 yang telah ditetapkan dengan Perda Nomor Tahun 2014, Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Riau adalah **"Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur"**

Untuk mencapai visi tersebut, telah ditetapkan 7 (tujuh) misi yang harus dilaksanakan sebagai arah dan batasan proses pencapaian tujuan, yaitu :

Maju : Tersedianya infrastruktur, sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan berkualitas serta

		berteknologi tinggi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
Sejahtera	:	Terciptanya kondisi masyarakat yang makmur, aman dan nyaman serta merata dari segala aspek ekonomi, sosial, politik, hukum dan keamanan.
Berbudaya Melayu	***:***	***Merupakan upaya terus-menerus untuk menggali dan menerapkan nilai-nilai budaya melayu sebagai jati diri dan menjadi roh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan dalam menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat budaya melayu***
Berdaya saing	:	Suatu kondisi Pemerintah dan Masyarakat yang tangguh, unggul dan memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang terhadap dinamika perubahan dengan tetap berpegang pada nilai-nilai budaya melayu,tatanan sosial yang agamis.
Menurunnya kemiskinan	:	Suatu kondisi masyarakat yang mampu memenuhi kebutuhan hak–hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang layak dan bermartabat.
Lapangan kerja	:	Tersedianya peluang dan kesempatan bagi angkatan kerja melalui kemitraan antara pemerintah, swasta dan masyarakat.
Pemantapan Aparatur	:	Meningkatkan Profesionalisme dan etos kerja dalam memberikan pelayanan prima menjalankan fungsi pemerintahan.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi dan program Gubernur Riau tersebut, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau berdasarkan tugas pokok dan fungsinya berkewajiban terhadap upaya pencapaian

misi ke 3 .

1. Misi 3 yaitu Berbudaya Melayu

   Pada misi ke 3 ini Dinas Kebudayaan Provinsi Riau bertanggung jawab terhadap menggali dan menerapkan nilai-nilai budaya Melayu sebagai jati diri dan menjadi roh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan dalam menjadikan Provinsi Riau sebagai pusat budaya Melayu.

3.3. Telaahan Renstra Direktorat Jendral Kebudayaan

3.3.1 Telaah Visi dan Misi Bidang Kebudayaan

Merujuk pada rumusan Visi dan Misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015 - 2019 maka dirumuskan Visi Pembangunan Kebudayaan oleh Direktorat Jendral Kebudayaan yaitu : " **Terbentuknya Insan dan Ekosistem Kebudayaan yang Berkarakter Dengan Berlandaskan Gotong Royong ".**

Rumusan Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Insan Kebudayaan : Seluruh pemangku kepentingan bidang kebudayaan yang meliputi : Pelaku budaya dan Masyarakat.

Ekosistem Kebudayaan :

1. Warisan dan Karya Budaya.
2. Masyarakat
3. Industri
4. Organisasi Profesi
5. Pemerintah
6. Keluarga
7. Pelaku Budaya
8. Pengelola Budaya
9. Institusi Pendidikan
10. Sarana prasarana Budaya
11. Tata Kelola
12. Media

Berkarakter	:	Memiliki 8 (delapan) nilai : 1. Memiliki Integritas 2. Kreatif dan Inovatif 3. Inisiatif 4. Pembelajar 5. Menjunjung Meritokrasi 6. Terlibat Aktif 7. Tanpa Pamrih 8. Apresiatif
Berlandaskan Gotong Royong	:	Mewujudkan sikap dan semangat kebersamaan olehbanyakpihak secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong

Untuk mewujudkan misi tersebut, Dirjen Kebudayaan telah menetapkan lima misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan Insan Budaya yang Kuat, Tangguh dan Berkarakter
2. Mewujudkan Pelestarian Nilai Sejarah dan Warisan Budaya yang berkelanjutan
3. Mewujudkan Inovasi dan Kreatifitas Karya Budaya yang Berdaya Saing
4. Mewujudkan Diplomasi Budaya yang Efektif dan Produktif
5. Mewujudkan Penguatan Tata kelola serta Peningkatan Efektifitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

3.3.2 Tujuan Strategis

Selanjutnya Berdasarkan Misi Pembangunan Kebudayaan ditetapkanlah Tujuan Pembangunan Bidang Kebudayaan yaitu :

1. Peningkatan Kapasitas dan Peran Insan Budaya dalam Melestarikan Kebudayaan.

2. Peningkatan Pelestarian Warisan Budaya (Benda dan Tak Benda)
3. Peningkatan Daya Saing Karya Budaya Melalui Inovasi dan Kreatifitas
4. Peningkatan Diplomasi Budaya yang Efektif dan Produktif
5. Peningkatan Sistem Tata Kelola serta Peningkatan Efektifitas, Birokrasi dan Pelibatan Publik

3.3.3 Sasaran Jangka Menengah

Berdasarkan Tujuan tersebut maka dirumuskan sasaran pembangunan bidang kebudayaan sebagai berikut:

1. Meningkatnya perilaku, kesadaran dan peran masyarakat umum.
2. Meningkatnya profesionalisme dan peran pelaku budaya dalam melindungi mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan.
3. Meningkatnya kapasitas pengelola budaya dalam melestarikan kebudayaan
4. Meningkatnya perlindungan warisan budaya benda tak benda
5. Meningkatnya pengembangan warisan budaya benda tak benda.
6. Meningkatnya pemanfaatan warisan budaya benda tak benda
7. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai sejarah
8. Meningkatnya inovasi dan kreatifitas karya budaya
9. Meningkatnya apresiasi atas karya budaya
10. Meningkatnya apresiasi dan kebanggan terhadap keragaman budaya indonesia
11. Meningkatnya partisipasi dan peran aktif indonesia dalam pecaturan budaya dunia
12. Meningkatnya kualitas regulasi, serta pelayanan publik.
13. Meningkatnya koordinasi, integrasi dan sinergi pelestarian budaya
14. Meningkatnya kapasitas dan kualitas sarana prasarana budaya
15. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pembangunan kebudayaan.

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Penerapan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menimbulkan implikasi bagi jajaran pemerintah baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota. Salah satu implikasi yang perlu mendapat perhatian di daerah adalah menyangkut kapasitas dan kesiapan dalam tatanan kebijakan dan perencanaan untuk mengintegrasikan KLHS sebagai prinsip dan mekanisme pembangunan berkelanjutan dalam seluruh tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 32 tahun 2009. Sehubungan dengan itu, maka perlu dilakukan kajian penguatan kelembagaan dan pemangku kepentingan dan sumberdaya manusia untuk penerapan KLHS di Daerah. Kajian institusi, pemangku kepentingan dan sumberdaya manusia untuk penerapan KLHS ini disiapkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan rencana konsultasi, partisipasi dan jangkauan yang secara legal formal terkait dengan proses perencanaan dan implementasi pembangunan baik ditingkat kebijakan, perencanaan dan program mulai dari tingkat nasional, provinsi, sampai ke tingkat kabupaten/ kota dalam mengimplementasikan Kajian Strategi Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Seperti disebutkan diatas bahwa salah satu tujuan jangka pendek penerapan KLHS adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah. Sehubungan dengan itu, strategi peningkatan kapasitas

ditujukan untuk menetapkan tujuan dan prioritas penerapan KLHS dan meningkatkan efisiensi penerapan KLHS dalam penyusunan RTRW dan RPJMD. Implementasi dari strategi peningkatan kapasitas dalam jangka panjang merupakan standarisasi penerapan KLHS dalam penyusunan dan revisi RTRW, RPJM dan Kebijakan Rencana dan Program (KRP) isu spesifik yang mempunyai dampak lingkungan, sosial dan ekonomi signifikan sebagai suatu standar praktis dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan hasilnya dipertimbangkan untuk disetujui dan diterima secara luas oleh pemangku kepentingan.

Koordinasi dalam finalisasi rencana strategi dan implementasi peningkatan kapasitas merupakan sesuatu yang sangat penting guna mencegah terjadinya tumpang tindih program yang menyebabkan tidak efisiennya dukungan yang diberikan kepada pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan merupakan kunci keberhasilan penerapan KLHS.

Strategi peningkatan kapasitas penerapan KLHS dilaksanakan melalui tiga komponen utama yaitu: peningkatan kapasitas sistemik, kapasitas institusi dan kapasitas individu.

Kapasitas sistem adalah terkait dengan menyiapkan peraturan perundangan sebagai dasar legalitas, menyiapkan kebijakan dan kerangka kerja prosedur yang merupakan acuan dalam penerapan KLHS. **Kapasitas institusi** dimaksudkan adalah kemampuan organisasi untuk menerapkan KLHS secara efektif berdasarkan sistem yang sudah disiapkan. **Kapasitas Individu** dimaksudkan adalah kemampuan dan motivasi individu.

Strategi peningkatan kapasitas khususnya institusi dan individu di daerah di formulasikan agar penerapan KLHS dalam perencanaan pembangunan daerah adalah sebagai standar praktis dengan tujuan Pemerintah daerah mampu melaksanakan KLHS, kemudian hasil-hasil KLHS dapat diterima oleh semua pengambil keputusan; dan keterlibatan masyarakat, organisasi non-pemerintah dan dunia usaha sesuai dengan kepentingannya serta dapat memberikan kontrol dalam penerapan KLHS.

Dalam peningkatan kualitas pembangunan kebudayaan untuk melaksanakan KLHS ini belum secara signifikan diikuti oleh peningkatan kualitas

produk kebudayaan.

Hal ini disebabkan adanya beberapa tantangan dan permasalahan pokok antara lain:

1. Perubahan peraturan perundangan dan pedoman yang mengatur mekanisme pembangunan kebudayaan;
2. Masih adanya persepsi yang salah terhadap posisi Dinas Kebudayaan sebagai lembaga kebudayaan;
3. Belum mantapnya mekanisme kebudayaan antara Daerah dengan SKPD dan antara SKPD dengan SKPD;
4. Kurangnya semangat masyarakat dalam melestarikan kebudayaan;
5. Internal birokrasi: lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD, SKPD dengan Desa; rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan; rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah yang berakibat pada lebarnya celah fiskal (*fiscal gap);*

Internal Dinas Kebudayaan : belum mampu menyediakan *standard operating procedure (SOP)* perencanaan, alat-alat praktis analisis kelayakan kegiatan yang kredibel; belum meratanya kapasitas analitik SDM kebudayan; belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data, teknologi informasi dan komunikasi, penelitian dan pengembangan, serta pengendalian perencanaan pembangunan kebudayaan.

Secara historis dan budaya lokal, potensi keragaman dalam tatanan Riau juga sangat tinggi. Riau memiliki beberapa potensi untuk berkembangnya keragaman budaya pada tatanan internalnya. Tatanan internal dimaksud dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis. Pertama, adalah tatanan wilayah atau komunitas, yaitu tatanan yang mewujudkan sebagai hasil interaksi antara masyarakat dengan sumberdaya dan kondisi lingkungan geografis setempat. Interaksi yang bersifat unik itu berkembang demikian rupa berbentuk kelembagaan masyarakat (tata oganisasi kemasyarakatan dan nilai-nilainya serta pengetahuan lokal) yang merupakan soft-structure dari komunitas bersangkutan dalam memelihara keberlangsungan keberadaannya. Kedua, adalah tatanan fungsional, yaitu tatanan yang tidak berbasis kepada wilayah tetapi memiliki identitas yang spesifik. Dalam kehidupan sehari-hari, tatanan ini mewujud

sebagai organisasi kemasyarakatan lintas wilayah yang berperan (misi) untuk menghasilkan berbagai pilihan (choice) bagi masyarakat serta meningkatkan kemampuan memilih dan menyalurkan inspirasi (voice) dari masyarakat pada bidang kehidupan tertentu. Umumnya, tatanan jenis ini mengacu kepada seperangkat nilai yang bersifat spesifik, yang membuatnya berbeda dengan tatanan lain, walaupun mungkin memiliki visi dan misi yang sama. Kelompok etnis ini sekaligus membentuk rumpun budaya dan melahirkan tradisi dengan nilai luhur yang tinggi. Perjalanan sejarah Melayu Riau telah membuktikan dan menunjukkan berbagai kejayaan dengan menjadikan Riau sebagai pusat Kebudayaan Melayu. Bukti sejarah tersebut dapat ditunjukkan dengan adanya sejumlah peninggalan dan situs sejarah serta ditasbihkannya bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu bangsa Indonesia. Namun hal tersebut belum mampu "dieksplorasi" dan "diapresiasikan" dengan baik dan tepat di berbagai aspek kehidupan masyarakat Riau, baik pada tatanan interaksi kehidupan bermasyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan serta hubungan antar bangsa kawasan Asia Tenggara.

Provinsi Riau secara Geografis merupakan salah satu gateway atau pintu gerbang jalur lalu lintas Internasional di kawasan ASEAN, dengan kondisi ini wilayah Riau sejak dahulunya menjadi wilayah yang sangat terbuka, apabila dikaitkan dengan derasnya arus globalisasi tentu tidak dapat dipungkiri bahwa dengan posisi strategis tersebut Provinsi Riau relative lebih cepat menerima berbagai dampak dan implikasi baik yang bersifat positif maupun negative dibandingkan Provinsi lainnya. Semakin deras arus perkembangan dari satu sisi akan menyebabkan semakin laju pula proses pergeseran nilai-nilai budaya dalam masyarakat, Pergeseran dan perubahan yang terus menerus berlangsung dapat menyebabkan hilangnya nilai-nilai budaya warisan leluhur, sedangkan disisi lain apabila nilai-nilai yang masuk dan diserap dari luar tersebut bersifat positif akan dapat memperkaya khasanah Kebudayaan Melayu. Sementara itu kebudayaan menjadi modal penting pula untuk menggerakan perkembangan aktivitas ekonomi. Penempatan nilai-nilai Kebudayaan Melayu sebagai "Ruhnya Pembangunan Riau ke Depan" diletakkan dalam konteks yang proporsional dan dalam kerangka pembedayaan masyarakat secara komprehensif agar dapat memberikan nilai jati diri, ciri dan spesifikasi yang jelas terhadap keberadaan

masyarakat dan daerah Riau yang memiliki adat dan budaya luhur yakni "Melayu", maka peran kebudayaan Melayu menjadi sangat penting untuk mewarnai seluruh dinamika penyelenggaraan pembangunan, menjalankan roda pemerintahan dan mengembangkan kehidupan masyarakat yang dinamis. Kondisi keamanan dan ketertiban umum yang baik merupakan perwujudan sosial kemasyarakatan yang kondusif bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial. Kondisi tersebut terbangun oleh kehidupan masyarakat yang damai, toleransi antar etnis dan agama, serta kesiagaan dalam menghadapi gangguan sosial.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Pelestarian Cagar Budaya, menyatakan bahwa Pelindungan Cagar Budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem Zonasi berdasarkan hasil kajian. Yang mana sistem Zonasi mengatur fungsi ruang pada Cagar Budaya, baik vertikal maupun horizontal. Pengaturan Zonasi secara vertikal dapat dilakukan terhadap lingkungan alam di atas Cagar Budaya di darat dan/atau di air. Sistem Zonasi terdiri atas: a. zona inti; b. zona penyangga; c. zona pengembangan; dan/atau d. zona penunjang.

(4) Penetapan luas, tata letak, dan fungsi zona ditentukan berdasarkan hasil kajian dengan mengutamakan peluang peningkatan kesejahteraan rakyat.

Pengembangan Warisan Budaya dan Cagar Budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat padanya. Setiap orang dapat melakukan Pengembangan Warisan Budaya dan Cagar Budaya setelah memperoleh: a. izin Pemerintah Daerah; dan b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Warisan Budaya dan Cagar Budaya. Pengembangan Warisan Budaya dan Cagar Budaya dapat diarahkan untuk memacu pengembangan ekonomi yang hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan Warisan Budaya dan Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Setiap kegiatan pengembangan Warisan Budaya dan Cagar Budaya harus disertai dengan pendokumentasian. Pemanfaatan lokasi temuan yang telah ditetapkan sebagai Situs Cagar Budaya wajib memperhatikan fungsi ruang dan pelindungannya.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Untuk mewujudkan Provinsi Riau yang maju, sejahtera dan berdaya saing tinggi masih banyak permasalahan dan persoalan pembangunan internal maupun eksternal. Permasalahan dan tantangan yang dihadapi Provinsi Riau meliputi infrastruktur wilayah, lingkungan dan sumber daya alam, ketahanan sosial dan budaya, kapasitas dan kualitas pemerintahan, kerjasama regional dan daya saing ekonomi daerah yang dihimpun dalam 3 aspek pembangunan yaitu (1) aspek kesejahteraan masyarakat yang meliputi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya, dan olah raga; (2) aspek pelayanan umum yang terdiri dari (a) urusan wajib meliputi; pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan sejahtera, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan pilotik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informatika serta perpustakaan. (b) Urusan pilihan meliputi; pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan ketransmigrasian. (3) aspek daya saing daerah, aspek ini meliputi kemampuan Renstra SKPD Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 2017-2019 ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan kualitas sumber daya manusia. Dari berbagai permasalahan pembangunan daerah, sesuai dengan dinamika pembangunan serta kondisi objektif yang ada, isu-isu strategis memiliki dampak yang signifikan dalam menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan dimasa datang, untuk itu isu-isu strategis pembangunan Provinsi Riau perlu dirumuskan berdasarkan permasalahan-permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah kedepan yang meliputi aspek-aspek pembangunan daerah serta memperhatikan isu-isu global dan nasional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai permasalahan tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa lima tahun kedepan isu strategis Provinsi Riau adalah sebagai berikut: a. Pengembangan infrastruktur

dan integrasi jaringan transportasi b. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan c. Pengurangan kemiskinan, ketimpangan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja d. Pengoptimalisasi pengembangan sektor dan komoditas unggulan wilayah e. Peningkatan pelayanan publik, kualitas birokrasi dan tata kelola f. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan g. **Pembangunan budaya melayu dan kehidupan beragama** h. Peningkatan peran swasta, investasi dan optimalisasi peran kawasan strategis provinsi i. Penanggulangan kerawanan bencana dan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. j. Isu strategis lingkungan terkait dengan pengelolaan hutan, pencemaran air, tanah dan udara, efek gas rumah kaca, masih adanya gangguan kawasan hutan yang menyebabkan degradasi dan deforestasi kawasan hutan, bencana geologi, terjadinya kerusakan lahan di lahan gambut. k. Peningkatan daya saing global l. Peningkatan kemandirian pangan m. Peningkatan ketahanan energi Isu strategis dari faktor-faktor pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD, berdasarkan hasil analisis gambaran pelayanan SKPD, hasil analisis Renstra K/L dan Renstra kabupaten/kota, hasil telaahan RTRW dan hasil analisis KLHS, untuk bidang kebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Pergeseran nilai-nilai budaya yang secara terus-menerus berlangsung dalam kehidupan masyarakat di Provinsi Riau memberikan pengaruh signifikan bagi Budaya Melayu sebagai budaya tempatan terhadap penetrasi budaya asing. Hal tersebut diakibatkan oleh pengaruh globalisasi yang semakin menguat, terbukanya akses informasi melalui perkembangan teknologi informasi, dan fenomena tersebut tidak dapat dicegah sepenuhnya. Nilai-nilai kemelayuan yang terimplementasikan dalam wujud makanan, busana, adat perkawinan yang mendirikan khas Melayu Riau relatif belum memasyarakat di Provinsi Riau.
2. Peran serta masyarakat dalam mewujudkan Riau sebagai pusat budaya Melayu sesuai Visi Riau 2020, dipandang belum optimal. Sikap masyarakat Riau dalam konteks budaya, menempatkan aspek kemelayuan baru sebatas simbol-simbol artifisial dan relatif belum diimplementasikan.
3. Budaya Melayu yang diidentikkan dengan Islam, relatif belum

memberikan determinasi positif terhadap aspek moralitas dan perilaku yang belum mencirikan penerapan nilai-nilai yang Islami.

4. Kebijakan desentralisasi melalui otonomi daerah dengan penafsiran kurang tepat, seperti kehendak untuk pemekaran daerah yang bersifat elitis berpotensi menyebabkan terjadinya disintegrasi lokal dan nasional.
5. Arus globalisasi yang bergerak secara pesat serta perkembangan teknologi yang membuka akses informasi secara luas memberikan tantangan terhadap degradasi nilai-nilai luhur budaya Melayu. Globalisasi yang membuka akses terhadap informasi, modal, dan kesempatan kerja berpotensi menghilangkan identitas kemelayuan, mengancam eksistensi budaya lokal, serta mengubah perilaku menjadi semakin permisif. Tantangan tersebut membutuhkan jawaban melalui kontinuitas dan konsistensi kebijakan penerapan nilai-nilai budaya Melayu dalam kehidupan masyarakat.
6. Upaya menuju penerapan nilai-nilai Melayu yang Islami membutuhkan keteladanan para pemimpin lokal secara nyata dan langsung, baik melalui kepemimpinan formal pada jajaran birokrasi pemerintah daerah maupun kepemimpinan informal melalui tokoh-tokoh masyarakat.

Isu Strategis terkait dengan aspek kebudayaan antara lain adalah:

1. Peningkatan kualitas dan kompetensi SDM kebudayaan
2. Meningkatkan sistem data dan informasi, standar mutu pelestarian (perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan), dan pengelolaan kebudayaan yang berbasis riset, terarah, terpadu dan berkelanjutan
3. Peningkatan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan
4. Meningkatkan pendanaan untuk peningkatan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan.

5. Penguatan pembinaan kesiswaan terkait dengan pemantapan nilai-nilai nasionalisme dan nilai–nilai budaya pada semua jenis dan jenjang satuan pendidikan
6. Peningkatan pengelolaan kebudayaan yang sistematis, terarah, dan menyeluruh

Peluang dan tantangan dalam menyelesaikan isu strategis pelestarian kebudayaan antara lain adalah:

1) Pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap nilai penting cagar budaya dan warisan budaya
2) Lemahnya penegakan hukum terhadap tindak kejahatan dan pelanggaran terhadap cagar budaya dan /atau warisan budaya.
3) Sering terjadinya benturan kepentingan antar pihak-pihak yang terkait dalam pengelolaan cagar budaya dan/atau warisan budaya.
4) Sebagian besar kawasan cagar budaya di wilayah Provinsi Riau berada di kawasan urban sehingga terancam eksistensinya dan kurang mampu mempertahankan citra kawasan.
5) Tidak seluruh masyarakat yang tinggal di KCB (Kawasan Cagar Budaya) memiliki, pemahaman dan kebanggaan atas penetapan wilayah tinggalnya sebagai KCB (Kawasan Cagar Budaya).
6) Beberapa kawasan cagar budaya misalnya Candi Muara Takus, Candi Sintong, kawasan cagar budaya kotalama, Masjid Sultan Pranap, Rumah Kuning Inhil, dll terletak jauh dari kawasan perkortaan cenderung kurang diperhatikan karena keletakannya yang relatif terisolir.
7) Terbatasnya keterlibatan tenaga ahli, peneliti di bidang Kepurbakalaan dalan proses pengelolaan Cagar Budaya.
8) Terbatasnya dana dalam pengelolaan sejarah cagar budaya dan permuseuman
9) Minimnya sosialisasi tentang sejarah, cagar budaya dan permuseuman

10) Minimnya informasi tentang sejarah, cagar budaya dan permuseum melalui media
11) Citra museum di masyarakat yang kurang menguntungkan, seperti gudang penyimpanan barang antik.
12) Koordinasi dan kerjasama antar lembaga permuseuman di tingkat Provinsi dan Pusat belum terorganisir dengan baik.
13) Masyarakat belum bisa memanfaatkan museum sebagai sarana edukasi dan rekreasi.
14) Keterbatasan kemampuan SDM yang tersedia sehingga berpengaruh pada pengelolaan museum yang kurang profesional, display koleksi yang kurang tertata, kandungan informasi koleksi yang masih minim.
15) Lembaga kerjasama antar museum di tingkat lokal dan nasional belum dilakukan secara maksimal untuk mendukung pengembangan museum.
16) Fasilitas museum yang secara umum hanya untuk mendukung upaya konservasi, dan masih sangat terbatas fasilitas bagi penunjang edukasi dan rekreasi.

Tabel 3.5.1 Matrik Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Berdasarkan Sasaran Renstra K/L Berserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Berkembangnya sanggar-sanggar budaya tradisional masyarakat	Pengaruh budaya luar yang negatif, perlu diantisipasi dan ditangani secara serius.	Kebanyakan generasi muda masih belum termotivasi untuk menonjolkan budaya khas daerah	Sanggar-sanggar budaya yang ada di Provinsi Riau cukup eksis, sampai ke TMII Jakarta
2.	Dokumen dan benda – benda peninggalan budaya harus dirawat dan dijaga kelestariannya	Kurang terawatnya benda – benda peninggalan budaya, atau Benda Cagar Budaya (BCB)	Dalam pemeliharaan dokumen dan benda peninggalan bersejarah, belum optimal	Dokumen dan Peninggalan Bersejarah atau Benda Cagar Budaya (BCB) akan menjadi perhatian dari pemerintah daerah

Tabel 3.5.2

Matrik Permasalahan Pelayanan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Beserta Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra SKPD Provinsi	Permasalahan Pelayanan SKPD	Sebagai Faktor	
			Penghambat	Pendorong
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan kompetensi pegawai SKPD Provinsi	Kurang adanya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM yang kompeten di SKPD	Kurangnya minat pegawai yang mengikuti pelatihan peningkatan SDM	Terdapat banyak pelatihan, bimtek untuk meningkatkan kualitas SDM yang kompeten
2	Melestarikan seni budaya tradisional	Kurangnya upaya pelestarian kesenian dan bangunan tradisional/ bersejarah	Kurangnya peminat untuk melestarikan kesenian dan masih terdapat bangunan bersejarah (BCB) yang kurang terawat	Terdapat berbagai macam kesenian, bangunan bersejarah dan benda cagar budaya (BCB) di Kabupaten/ kota
3	Membudayakan lingkungan seni/ organisasi seni budaya tradisi khas daerah	Kurang adanya peningkatan pemberdayaan lingkungan seni/organisasi seni budaya	Kurangnya faktor pendukung baik sumbangan dana maupun fasilitas untuk membudayakan lingkungan seni	Masih ada organisasi masyarakat yang tetap perhatian dan berperan di bidang seni budaya daerah

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau (2017-2018)

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2017-2018 yang lebih jelas guna menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi.

4.2.1 Tujuan Strategis

Tujuan strategis Dinas Kebudayaan tahun 2017-2018 dirumuskan untuk menghasilkan kebudayaan yang andal sebagaimana dikehendaki dalam rumusan visi Dinas Kebudayaan dengan memperhatikan rumusan misi. Dengan demikian, tujuan strategis Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 2017-2018 adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan pelestarian adat, nilai budaya dan masyarakatnya melalui inventarisasi dan pendokumentasian.
   a. Peningkatan inventarisasi dan pendokumentasian adat, nilai budaya dan masyarakatnya
2. Mewujudkan Riau sebagai pusat bahasa dan seni Budaya Melayu di Asia Tenggara.
   a. Peningkatan peran Riau sebagai pusat bahasa dan seni budaya Melayu di Asia Tenggara.
3. Mewujudkan diplomasi dan publikasi budaya Melayu berbasis teknologi informasi.
   a. Peningkatan diplomasi dan publikasi

4. Mewujudkan Riau sebagai pusat sejarah, cagar budaya dan pengembangan permuseuman
   a. Peningkatan Peran Provinsi Riau sebagai pusat sejarah, cagar budaya dan pengembangan permuseuman khususnya museum tematik
5. Mewujudkan Riau sebagai pengumpul, perawat serta penyaji warisan benda dan tak benda seni budaya Melayu
   a. Peningkatan Peran Provinsi Riau sebagai pengumpul, perawat serta penyaji warisan benda dan tak benda seni budaya Melayu

4.2.2. Sasaran Jangka Menengah (2017-2018)

Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis pembangunan Kebudayaan diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2018. Sasaran strategis untuk tiap tujuan strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan Strategis Peningkatan inventarisasi dan dokumentasi adat, nilai budaya dan masyarakatnya.
   1) Meningkatnya inventarisasi dan dokumentasi Nilai–nilai adat dimasyarakat
   2) Meningkatnya inventarisasi dan dokumentasi Nilai-nilai budaya dimasyarakat
2. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan Strategis Peningkatan peran Riau sebagai pusat bahasa dan seni budaya Melayu di Asia Tenggara
   1) Meningkatnya Peran Riau sebagai pusat bahasa di Asia Tenggara
   2) Meningkatnya Peran Riau sebagai pusat budaya Melayu di Asia Tenggara
3. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan Strategis Peningkatan diplomasi dan publikasi budaya Melayu disemua aspek yang berbasis teknologi informasi

1) Meningkatnya diplomasi budaya antar Negara serumpun
2) Meningkatnya publikasi budaya Melayu dalam hal promosi yang berbasis teknologi informasi

4. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan Strategis Peningkatan Peran Provinsi Riau sebagai pusat sejarah, cagar budaya dan pengembangan permuseuman
   1) Meningkatnya peran Provinsi Riau sebagai pusat sejarah
   2) Meningkatnya peran Provinsi Riau sebagai pelestarian cagar budaya
   3) Meningkatnya peran Provinsi Riau sebagai pengembangan permuseuman khususnya museum tematik
5. Sasaran strategis untuk mencapai tujuan Strategis Peningkatan Peran Provinsi Riau sebagai pengumpul, perawat serta penyaji warisan benda dan takbenda seni budaya Melayu
   1) Meningkatnya Jumlah Warisan Benda dan takbenda budaya Melayu yang ditetapkan
   2) Meningkatnya Peran Provinsi Riau sebagai pengumpul, perawat serta penyaji warisan benda dan takbenda seni budaya Melayu

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau diatas dapat dilihat pada tabel T-C.25 terlampir.

Tabel T-C.25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN Ke -		
				2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	1. Mewujudkan pelestarian	1) Meningkatnya inventarisasi	Jumlah dokumentasi nilai	na	na	na
	adat, nilai budaya dan	dan dokumentasi Nilai –	adat di masyarakat yang ter-			
	masyarakatnya melalui	nilai adat dimasyarakat	daftar			
	inventarisasi dan	2) Meningkatnya inventarisasi	Jumlah dokumentasi nilai			
	pendokumentasian	dan dokumentasi Nilai-nilai	budaya di masyarakat yang ter-			
		budaya dimasyarakat	daftar			
2	Mewujudkan Riau sebagai	1) Meningkatnya Peran Riau	Persentase peran Riau sebagai	50	60	70
	pusat bahasa dan seni budaya	sebagai pusat bahasa di Asia	pusat bahasa			
	Melayu di Asia Tenggara	Tenggara				
		2) Meningkatnya Peran Riau	Persentase peran Riau sebagai	50	60	70
		sebagai pusat budaya	pusat Budaya Melayu			
		melayu di Asia Tenggara				
3	Mewujudkan diplomasi dan	1) Meningkatnya diplomasi	Jumlah diplomasi budaya	0	2	4
	publikasi budaya melayu	budaya atar Negara serumpun				
	berbasis teknologi informasi	2) Meningkatnya publikasi	Jumlah publikasi budaya Melayu	3	3	3
		budaya melayu dalam hal				
		promosi yang berbasis				
		teknologi informasi				
4	Mewujudkan Riau sebagai pusat	1) Meningkatnya peran	Persentase peran Riau sebagai	1	1	1
	sejarah, cagar budaya dan	Provinsi Riau sebagai pusat	pusat sejarah			
	pengembangan permuseuman	sejarah				
		2) Meningkatnya peran Provinsi	Persentase peran Riau sebagai	30	90	100
		Riau sebagai cagar budaya	cagar budaya			
		3) Meningkatnya peran Provinsi	Persentase peran Riau sebagai	0	2	2
		Riau sebagai pengembangan	pengembangan permuseuman			
		permuseuman khususnya				
		museum tematik				
5	Mewujudkan Riau sebagai	1) Meningkatnya Jumlah Warisan	Jumlah warisan benda dan tak	30	116	133
	pengumpul, perawat serta	Benda dan takbenda budaya	benda yang ditetapkan			
	penyaji warisan benda dan	Melayu yang ditetapkan				
	takbenda Seni Budaya Melayu	2) Meningkatnya Peran Provinsi	Persentase peran Provinsi Riau	60	70	80
		Riau sebagai pengumpul,	Riau sebagai pengumpul,			
		perawat serta penyaji warisan	perawat serta penyaji warisan			
		benda dan takbenda seni	benda dan takbenda seni			
		budaya melayu	budaya melayu			

Pentahapan pencapaian sasaran strategis dari tujuan strategis T8 ditunjukkan pada Tabel 4.1

Tabel 4.1
Pentahapan Pencapaian Sasaran Strategis dari Tujuan Strategis

No	Sasaran Strategis	Kondisi Awal (2013)	Tahun				
			2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1	Jumlah Komunitas Adat Terpencil yang terinventarisir/terdata	0	2	4	7	9	12
2	Jumlah karya seni budaya yang diinventarisir dan didaftarkan ke HAKI	0	10	20	30	40	50
3	Jumlah Upacara Adat Melayu yang didokumentasikan	0	2	4	7	9	12
4	Jumlah event dan kegiatan berkesenian di Taman Budaya	0	7	14	21	28	35
5	Jumlah Komunitas Budaya yang di fasilitasi	0	6	12	18	24	30
6	Cagar budaya yang dilestarikan/terdaftar	25	40	55	70	85	100
7	Jumlah buku sejarah lokal yang dicetak	0	500	1000	1500	2000	2500
8	Jumlah frekwensi promosi dan misi kebudayaan yang dilaksanakan	0	3	6	9	12	15

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dekemukakan rumusan pernyataan Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah lima tahun mendatang, yaitu Tabel T-C.26 yang dapat menunjukkan relevansi dan konsistensi antar pernyataan visi dan misi RPJMD periode 2014-2019 berkenaan dengan tujuan, sasaran, dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Strategi dan Kebijakan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Strategi dan arah kebijakan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2017-2018 dirumuskan berdasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Riau dan Rencana Strategis Direktorat Jendral Kebudayaan Tahun 2015-2019, RPJMN 2015—2019, RPJMD 2017-2018

Strategi dan arah kebijakan kebudayaan dirumuskan untuk memberikan arah dan pedoman bagi pengelolaan kebudayaan terkait dengan cara-cara yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis yang menggambarkan tujuan-tujuan strategis. Telaah terhadap sasaran-sasaran strategis yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya. Kebutuhan tersebut mencakup infrastruktur, konten, pemanfaatan, SDM, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola.

5.1. Strategi

Strategi merupakan upaya yang sistematis untuk mencapai tujuan strategis yang telah ditetapkan melalui pencapaian sasaran-sasaran strategis dari tujuan strategis tersebut. Tiap strategi menjelaskan komponen-komponen penyelenggaraan layanan kebudayaan yang harus disediakan untuk mencapai sasaran-sasaran strategis dari tiap tujuan strategis. Komponen-komponen tersebut antara lain meliputi pemahaman pluraritas sosbud dalam masyarakat

(membangun harmoni sosial, toleransi, dan kesatuan dalam keanekaragaman; Pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak benda (intangible); karakter yang tangguh dengan melestarikan, memperkukuh dan menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia; tingginya operasional keragaman seni dan kreativitas karya budaya yang mendorong lahirnya insan kebudayaan yang professional lebih banyak dan berkembangnya promosi dan diplomasi budaya.

Dalam pemilihan strategi juga mempertimbangkan disparitas antar wilayah, gender, sosial ekonomi, serta antar kebudayaan yang diselenggarakan pemerintah dan masyarakat, strategi tersebut meliputi sebagai berikut:

Strategi Umum

Dari seluruh strategi pembangunan kebudayaan tersebut dapat dirumuskan ke dalam strategi umum didasarkan pada komponen yang ada dalam sistem kebudayaan seperti terlihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1 Rumusan Strategi Umum

No	**Komponen Sistem Kebudayaan**	**Strategi Umum**
1	Sarana dan Prasarana	Peningkatan Sarana dan Prasarana kebudayaan
2	Pendanaan	Penyediaan subsidi untuk meningkatkan Keterjangkauan layanan kebudayaan berkualitas yang merata di seluruh kabupaten,dan kota
3	Tata Kelola	Melanjutkan reformasi birokrasi untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis kebudayaan
		Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja
		Penguatan akuntabilitas sistem keuangan dan pengelolaan Aset di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
		Penguatan akuntabilitas sistem pengawasan internal Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

5.2.Arah Kebijakan

Arah kebijakan dan strategi untuk mencapai sasaran strategis pada setiap tujuan strategis dalam mendukung Misi : **Mewujudkan pelestarian adat, nilai budaya dan masyarakatnya melalui inventarisasi dan pendokumentasian** dicapai dengan menggunakan strategi sebagai berikut:

a. Penyediaan sumber daya manusia kebudayaan yang berkualitas dan berkompeten;
b. Peningkatan sistem, data dan informasi, standar mutu pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan), dan pengelolaan kebudayaan yang berbasis riset, terarah, terpadu, dan berkelanjutan;
c. Penyediaan dan peningkatan sarana dan prasarana untuk peningkatan pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan), dan pengelolaan kebudayaan yang sistematis, terarah, dan menyeluruh di wilayah NKRI; dan penyediaan pendanaan untuk peningkatan pelestarian (pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan), dan pengelolaan untuk mendukung tercapainya tujuan sasaran strategis kebudayaan.

Pencapaian target Program Pelestarian Budaya dicapai melalui kegiatan berikut:

1. Pengembangan dan pelestarian Nilai-nilai Budaya dengan sub kegiatan:
   1) Konsultasi dan Koordinasi Bidang Kebudayaan se Provinsi Riau
   2) Penerbitan Buku Cerita Rakyat dan Lagu daerah se Provinsi Riau
   4) Seminar Kebudayaan Melayu
   5) Inventarisasi Komunitas Adat Terpencil se Provinsi Riau
   6) Pendokumentasian Upacara Adat Melayu se Provinsi Riau
   7) Inventarisasi dan Pendaftaran HAKI Karya Seni Budaya se Provinsi Riau
   8) Inventarisasi Tokoh dan Pelaku Budaya se Provinsi Riau
   9) Anugerah Seni dan Budaya untuk Tokoh dan Pelaku Seni Budaya se Provinsi Riau
   10) Festival Seni Budaya KAT se Provinsi Riau
   11) Dukungan Penyelenggaraan Even Budaya se Provinsi Riau

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan dengan sub kegiatan:
   1) Peningkatan sarana Kesenian untuk Komunitas Masyarakat Etnis Melayu dan Non Melayu
   2) Peningkatan Sarana dan Prasarana Taman Budaya
   3) Rehab Sarana dan Prasarana Museum Sang Nila Utama
   4) Penyelenggaraan event dan kegiatan berkesenian di taman budaya
3. Perlindungan, pengembangan dan Pemanfaatan kebudayaan/Cagar Budaya (CB) dengan sub kegiatan berikut:
   1) Pendaftaran Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Riau
   2) Pendaftaran Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau
   3) Registrasi Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Riau
   4) Registrasi Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau
   5) Penetapan Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Riau
   6) Penyelamatan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau
   7) Pengadaan Perangkat Teknologi Informasi Bidang Sejarah, Cagar Budaya dan Permuseuman
   8) Pemetaan Situs Cagar Budaya
   9) Pemugaran Cagar Budaya
   10) Konservasi Cagar Budaya Tidak Bergerak
   11) penelitian Situs Cagar Budaya
   12) Studi Teknis Cagar Budaya
   13) Studi Pelestarian Cagar Budaya

a. Arah Kebijakan Pembangunan Kebudayaan Tahun 2014 -2018

Strategi umum sebagaimana dirumuskan pada bagian sebelumnya dipergunakan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan kebudayaan periode tiga tahun yang akan datang. Berikut ini akan diuraikan beberapa arah kebijkan. Tabel 5.2. berikut menggambarkan keterkaitan antara strategi umum dan arah kebijakan dari Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang akan ditempuh dalam periode dua tahun kedepan (2017-2018) dan dalam rangka mewujudkan visi misi dan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan

jangka menengah yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya.

Tabel 5.2

Keterkaitan Strategi Umum dengan Arah Kebijakan

Strategi Umum	Arah Kebijakan
Penataan struktur organisasi untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran strategis kebudayaan	a. Melanjutkan reformasi birokrasi b. Koordinasi antar Kementerian dan/atau Lembaga Pemerintah pusat dan daerah
Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja	
Penguatan akuntabilitas sistem keuangan dan pengelolaan Aset di lingkungan Dinas Kebudayaan	
Penguatan akuntabilitas sistem pengawasan internal Kemdikbud	
Strategi Umum Gabungan	c. Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan sebagai jati diri bangsa

Penjelasan dari arah kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan inti dari berbagai program prioritas guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dinas Kebudayaan menjadi salah satu dari SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau yang harus menyelesaikan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi sangat diperlukan sejalan dengan tanggung jawab Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam mengelola anggaran fungsi pendidikan sebesar 20% dari APBD. Berdasarkan kajian awal reformasi birokrasi

pada tahun 2009, reformasi birokrasi dilaksanakan antara lain melalui kebijakan sebagai berikut:

a. penguatan pelaksanaan manajemen perubahan;

b. penataan peraturan perundang-undangan;

c. penataan dan penguatan organisasi;

d. penataan tatalaksana;

e. penataan sistem manajemen SDM aparatur;

f. penguatan pengawasan;

g. penguatan akuntabilitas kinerja;

h. peningkatan layanan kebudayaan;

i. penguatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan

b. Koordinasi Antar, Dinas Kab/Kota dan/atau Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah

Kondisi saat ini masih terdapat tumpang tindih dalam pelaksanaan kegiatan antar bidang maupun antar pusat dan daerah serta kurang terintegrasinya penetapan prioritas serta target kinerja kebudayaan di pusat dan di daerah. Sesuai dengan PP No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Kota, telah diatur pembagian urusan antara Kemdikbud, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten dan Kota, dalam pengelolaan kebudayaan. Koordinasi antar Dinas Pendidikan dan Kebudayan Kabupaten/Kota serta Kemendikbud dilaksanakan dengan mengacu pada kebijakan sebagai berikut:

a. peningkatan koordinasi antara Dinas Kebudayaan dengan Dinas terkait dilingkungan Pemerintah Provinsi dan antar Dinas Pendidikan d a n Kebudayan Kabupaten Kota serta Kemendikbud untuk mensinergikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kebudayaan; dan

b. peningkatan koordinasi antara Kemdikbud dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota untuk mensinergikan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi kebudayaan.

c. Pelestarian dan Pengelolaan Kebudayaan sebagai Jati Diri Bangsa

Kebudayaan melekat pada individu dan masyarakat sehingga kebudayaan menjadi penentu identitas, jati diri dan karakter manusia. Kebudayaan mencakup berbagai hal seperti pengetahuan, kesenian, tradisi, sejarah, sistem kepercayaan, teknologi dan berbagai wujud benda yang menjadi hasil kebudayaan. Kebudayaan tidak diperoleh oleh individu maupun masyarakat secara otomatis, tetapi diperoleh melalui proses belajar baik secara formal maupun nonformal. Proses belajar tersebut dilakukan dengan pelestarian dan pengelolaan kebudayaan yang bertujuan untuk menciptakan manusia Indonesia yang cerdas, berkarakter, dan berjati diri. Tujuan kebudayaan tersebut dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

a. Penerapan prinsip keseimbangan dalam bidang pelestarian dan pengelolaan kebudayaan. Pelestarian merupakan upaya untuk memahami dan mewariskan akar identitas dan berbagai kearifan budaya yang telah ada, sedangkan pengelolaan kebudayaan merupakan upaya untuk menjawab tantangan dan permasalahan kebudayaan di masa kini dan masa mendatang;
b. pembelajaran kebudayaan dilakukan melalui pendidikan formal dan nonformal;
c. peningkatan kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia Kebudayaan berdasarkan tuntutan dan kekhasan tugas;
d. peningkatan kerja sama kelembagaan di tingkat wilayah, nasional, dan internasional;
e. peningkatan promosi untuk perluasan wilayah pemakaian bahasa Indonesia;
f. peningkatan upaya penggalian nilai budaya termasuk di dalamnya

sejarah, kearifan lokal, bahasa, dan karya-karya budaya materi;

g. pengembangan budaya serta pembudayaan melalui diseminasi, diplomasi, dan promosi budaya;
h. peningkatan kualitas pelestarian (perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan) dan pengelolaan cagar budaya dan permuseuman;
i. peningkatan kreativitas, apresiasi dan pemahaman masyarakat terhadap karya seni;
j. peningkatan kesadaran dan pemahaman multikultur dan penguatan kearifan lokal;
k. peningkatan kesadaran dan pemahaman sejarah serta penguatan jati diri dan karakter bangsa;
l. peningkatan ketahanan budaya dan apresiasi budaya;
m. peningkatan pelestarian dan pengelolaan warisan budaya dan kekayaan budaya;
n. peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap perlindungan dan pengelolaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional;
o. pemberdayaan kelembagaan kepercayaan, komunitas adat dan tradisi serta pemerhati budaya;
p. penguatan internalisasi nilai dalam pendidikan formal dan nonformal;
q. peningkatan dan penguatan peran diplomasi budaya di dalam dan luar negeri.

Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel T-C.26 terlampir.

Tabel T-C.26
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI : "Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur".			
MIS 6 : Pembangunan Masyarakat yang Berbudaya Melayu, Beriman dan Bertaqwa			
TUJUAN	**SASARAN**	**STRATEGI**	**ARAH KEBIJAKAN**
Membangun masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan bertaqwa	Lestarinya keanekaragaman budaya dan kearifan lokal	Jumlah Karya Cipta Seni Budaya Melayu yang dihasilkan (HAKI Karya Seni)	Melestarikan nilai-nilai dan keanekaragaman budaya melayu, beriman dan bertaqwa
		Jumlah Cagar Budaya Bergerak dan Tidak Bergerak yang ditetapkan	
		Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	
		Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah)	

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini akan disajikan beberapa hal terkait dengan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif sebagaimana tabel T-C.27 (terlampir). Adapun uraian dari bab ini adalah sebagai berikut:

6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja

Dinas Kebudayaan Provinsi Riau salah satu SKPD yang dijadikan sebagai SKPD prioritas dalam pelaksanaan visi dan misi Gubernur Riau. Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Revisi Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau 2017—2018 menjadi keharusan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan keberlanjutan program sekaligus memudahkan pimpinan baru dalam menjalankan tugas. Revisi Revisi Renstra juga merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (*output)* dan hasil (*outcome)* dalam pemanfaatan APBD. R e v i s i Revisi Renstra akan menjadi acuan *(guidance)* pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (*accountable)*.

Reformasi perencanaan dimaksudkan agar di dalam penyusunan Revisi Revisi Renstra tergambar secara jelas keterkaitan antara program, indikator kinerja, dan masukan (*input*) untuk setiap unit kerja/Bidang dan UPT. Reformasi perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk lebih memantapkan kembali penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (*performance based budgeting*) terutama sejak diberlakukannya undang- undang tentang penganggaran dan Keuangan. Dalam reformasi perencanaan dan penganggaran ini setiap Bidang dan UPT diharapkan menetapkan program dan kegiatan sesuai dengan

karakteristik tugas dan fungsinya. Program dan kegiatan di setiap Bidang dan UPT mencerminkan Program Prioritas Dinas Kebudayaan Provinsi Riau.

Melalui reformasi perencanaan dan penganggaran diharapkan diperoleh gambaran pembiayaan selama lima tahun mendatang. Pemerintah dapat menjamin penyediaan anggaran selama lima tahun mendatang. Penyusunan Revisi Renstra juga memperhatikan kemampuan keuangan Pemerintah. Revisi Renstra Dinas Kebudayaan Provinsi Riau ini disusun dengan menggunakan kombinasi pendekatan *bottom up* dan *top down* dengan keterlibatan seluruh Bidang dan UPT dilingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Pendekatan *top down* mengandung makna bahwa perencanaan ini memperhatikan pula ketersediaan anggaran sesuai dengan estimasi APBD. Dari sisi pelaksanaan, pendekatan *bottom up* dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan pendanaan guna mewujudkan kondisi ideal. Setelah tersusunnya Revisi Renstra ini, setiap Bidang utama harus menerjemahkannya ke dalam rencana tahunan yang terukur dengan menerapkan prinsip penganggaran berbasis kinerja.

Jika mengacu kepada struktur organisasi sebagaimana gambar 2.1, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau telah menyusun program- program pembangunan kebudayaan yang dihubungkan dengan tugas dan fungsi serta tujuan yang akan dicapai sampai dengan tahun 2018.. Pengelompokan program tersebut adalah seperti terlihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Program dan Bidang/UPT Pelaksana

No	Program	Bidang/UPT Pelaksana	T.A
1	Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai Budaya	Semua Bidang dan UPT	2017
2	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Semua Bidang dan UPT	2018
3	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Semua Bidang dan UPT	2018
4	Program Pengembangan Nilai Budaya	Semua Bidang dan UPT	2018

Uraian dari setiap program Dinas Kebudayaan sebagaimana tersebut diatas, disajikan pada subbab di bawah ini.

6.1.1. Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai Budaya

Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagai berikut:

a. Meningkatnya Karya Seni Budaya Melayu yang di akui dan terdaftar ke Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

b. Meningkatnya Jumlah Sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal berbasis budaya melayu

Dalam melaksanakan program ini, digunakan strategi sebagai berikut.

a. Inventarisasi karya seni budaya melayu

b. Kajian dan Pendokumentasian karya seni budaya melayu

c. Pendaftaran karya seni budaya melayu

Keberhasilan program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 6.2.

Tabel 6.2
Indikator Kinerja Utama Program
Pengembangan dan Pelestarian
Nilai Budaya

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal (2013) (%)	Tahun					
			2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019
1.	Jumlah Karya Cipta Seni Budaya Melayu yang dihasilkan (HAKI Karya Seni)	na	10	21	na	30	60	100
2.	Jumlah Cagar Budaya Bergerak dan Tidak Bergerak yang ditetapkan	na	na	na	na	30	40	50
3.	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	na	na	na	na	11	20	30
4.	Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah)	na	na	na	na	50	150	300

6.1.2. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Keberhasilan program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 6.3.

Tabel 6.3
Indikator Kinerja Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal (2013) (%)	Tahun				
			2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah kunjungan masyarakat ke museum	na	na	32.054	40.000	50.000	75.000
2.	Jumlah penciptaan seni kreasi baru/eksperimental	na	na	na	na	na	na

Pencapaian target Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dicapai melalui kegiatan sebagai berikut.

1. Perawatan Koleksi Museum Sang Nila Utama
2. Pembuatan Souvenir Museum Sang Nila Utama
3. Registrasi dan Inventarisasi Koleksi Museum
4. Direktori Organisasi Budaya Melayu Riau
5. Pembuatan Film Dokumenter Sejarah Perjuangan di Pekanbaru
6. Lawatan Sejarah Budaya Untuk Pelajar Se- Provinsi Riau
7. Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah
8. Penyusunan dan Rancangan Museum Tematik di Provinsi Riau
9. Kajian Sumber Sejarah Riau

6.1.3. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program Pengelolaan Keragaman Budaya, Keberhasilan program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 5.4.

Tabel 6.4
Indikator Kinerja Program Pengelolaan
Keragaman Budaya

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal (2013) (%)	Tahun				
			2014 (%)	2015 (%)	2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Jumlah pagelaran seni budaya di taman budaya (pagelaran)	0	7	14	21	28	35
2.	Jumlah pagelaran/komunitas budaya yang difasilitasi	0	6	12	18	24	30

Pencapaian target Program Pengelolaan Keragaman Budaya dicapai melalui kegiatan sebagai berikut.

1. Pameran Pagelaran Seni Se-Sumatera
2. Gita Bahana Nusantara
3. Hari Seni Taman Budaya
4. Parade Tari
5. Pengelolaan Taman Budaya
6. Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Aubade Hari Besar Nasional
7. Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi
8. Lomba Publikasi Budaya Melayu
9. Pameran Museum
10. Pemilihan Duta Budaya Melayu
11. Sistem Informasi Pusat Jaringan Kerjasama Pelestarian Budaya Melayu
12. Dialog Budaya di Televisi dan Radio
13. Media Center Budaya
14. Publikasi dan Promosi Budaya
15. Sayembara Penulisan Novel Melayu Se- Provinsi Riau
16. Festival Sastra Lisan Se- Provinsi Riau

17. Partisipasi Penyelenggaraan Even Budaya se Provinsi Riau dan Luar Provinsi Riau
18. Pusat Pelatihan Seni Untuk Anak-anak
19. Penyusunan Peta Budaya Melayu Provinsi Riau
20. Peningkatan Kapasitas Publikasi Budaya Melayu

6.1.4. Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengembangan Nilai Budaya, Keberhasilan program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti yang disajikan pada Tabel 5.5.

Tabel 6.5
Indikator Kinerja Program Pengembangan Nilai Budaya

No	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Kondisi Awal (2013) (%)	Tahun				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah warisan budaya yang terinventarisasi:	na	55	70	85	100	100
2	Warisan budaya tidak benda	na	na	na	na	25	32
3	Warisan budaya benda (cagar budaya)	0	0	0	30	91	101

Pencapaian target Program Pengembangan Nilai Budaya dicapai melalui kegiatan sebagai berikut.

1. Pembuatan Master Plan Kawasan Cagar Budaya.
2. Inventarisasi Cagar Budaya
3. Penetapan Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Riau
4. Kajian Budaya di Provinsi Riau
5. Penyelenggaraan Festival Seni Tradisi Se- Asean

6. Penganugerahan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Riau
7. Pertukaran Seniman Antar Negara Serumpun
8. Pendokumentasian Seni Budaya KAT Se- Provinsi Riau
9. Temu Karya Taman Budaya Se Indonesia
10. Pasar Seni Taman Budaya
11. Kampanye Permuseuman
12. Pameran Museum
13. Simposium Internasional Pernaskahan Nusantara
14. Penggandaan dan Penerbitan Buku Adat dan Tradisi Melayu Riau
15. Pendokumentasian Nilai-Nilai Tradisi Budaya Melayu Se- Provinsi Riau
16. Pembinaan Kearifan Lokal Khasanah Budaya Pekaian Daerah Riau
17. Pembinaan Tunjuk Ajar Melayu Riau Untuk Pelajar Se- Provinsi Riau

Selain melaksanakan program-program wajib bidang kebudayaan sebagaimana tersebut diatas, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Provinsi Riau melaksanakan program dan kegiatan non urusan wajib yaitu: 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur; 4) Program Peningkatan K apasitas Sumberdaya Aparatur;
5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan sebagai barikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan dari program ini adalah:

1) Penyediaan jasa surat menyurat
2) Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
3) Penyediaan jasa kebersihan kantor
4) Penyediaan alat tulis kantor
5) Penyediaan barang cetak dan penggandaan
6) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

7) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

9) Penyediaan makanan dan minuman

10) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

11) Penyediaan jasa keamanan kantor

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur Kegiatan dari program ini adalah:

1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
2) Pengadaan Mebeleur
3) Pengadaan Perlengkapan Kantor
4) Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
5) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
7) Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan dari program ini adalah:

1) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

2) Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

Kegiatan dari program ini adalah:

1) Pendidikan dan pelatihan formal

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

Kegiatan dari program ini adalah:

1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

2) Penyusunan laporan keuangan semesteran
3) Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
4) Penyusunan Rencana Strategis (REVISI RENSTRA) SKPD
5) Penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD

Kegiatan dari masing-masing program sebagaimana uraian tersebut diatas dapat dilihat pada tabel T-C.27 terlampir

Tabel T-C.27.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah DINAS KEBUDAYAAN Provinsi Riau

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017 (tambah)			2018 (tambah)			2019						
						Target (awal)	Target (Perubahan)	Pagu Rp.	Target (awal)	Target (Perubahan)	Pagu Rp.	Target (awal)	Target (Perubahan)	Pagu Perubahan Rp.	Target	Rp		
1	2	3	4	5	6	,		8	9		10	11		12	13	14	15	16
	Meningkatakan Efektifitan dan Integritas Pemerintah Daerah		**PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN**	**Tersedianya Peralatan Penatausahaan Perkantoran**				***1,988,000,000.00***			***2,518,368,500.00***	**-**		***3,105,000,000.00***	**-**	***7,262,768,500.00***	***DINAS KEBUDAYAAN***	***Pekanbaru***
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Surat yang dikirim		12 Bulan	260 Surat	15,000,000.00	200 Surat	200 Surat	9,600,000.00	200 Surat	200 Surat	9,600,000.00	660 Surat	34,200,000.00		
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi Air dan Listrik		12 Bulan	12 Bulan	330,000,000.00	12 Bulan	12 Bulan	618,000,000.00	12 Bulan	12 Bulan	618,000,000.00	36 Bulan	1,566,000,000.00		
			Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		12 Bulan	12 Bulan	155,600,000.00	19 Orang dan 2 Jenis	19 Orang dan 2 Jenis	422,400,000.00	19 Orang dan 2 Jenis	12 Bulan	618,000,000.00	36 Bulan	1,196,000,000.00		
			Penyediaan Alat Tulis Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Alat Tulus Kantor		12 Bulan	12 Bulan	100,000,000.00	19 Jenis	19 Jenis	96,620,500.00	19 Jenis	12 Bulan	100,000,000.00	36 Bulan	296,620,500.00		
			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan	Rentang Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		12 Bulan	12 Bulan	90,000,000.00	3 Jenis	3 Jenis	73,300,000.00	3 Jenis	12 Bulan	80,000,000.00	36 Bulan	243,300,000.00		
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik		12 Bulan	12 Bulan	25,000,000.00	3 Jenis	3 Jenis	72,300,000.00	3 Jenis	12 Bulan	80,000,000.00	36 Bulan	177,300,000.00		
			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Rentang Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan		12 Bulan	12 Bulan	25,000,000.00	2 Jenis	2 Jenis	84,095,000.00	2 Jenis	12 Bulan	90,000,000.00	36 Bulan	199,095,000.00		
			Penyediaan Makanan Dan Minuman	Jumlah Makan dan Minum yang disediakan		12 Bulan	12 Bulan	100,000,000.00	12 Bulan	6150 Box	126,000,000.00	12 Bulan	12 Bulan	120,000,000.00	36 Bulan	346,000,000.00		
			Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Frekuensi Rapat Kordinasi Keluar Daerah		12 Bulan	80 Kali	700,000,000.00	12 Bulan	85 Kali	515,653,000.00	12 Bulan	85 Kali	400,000,000.00	36 Bulan	1,615,653,000.00		
			Penyediaan Jasa Keamanan Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Keamanan Kantor		12 Bulan	12 Bulan	194,400,000.00	12 Bulan	10 Orang	230,400,000.00	12 Bulan	12 Bulan	640,800,000.00	36 Bulan	1,065,600,000.00		
			Penyediaan jasa sosialisasi, nformasi, publikasi dan kehumasan SKPD	Rentang Waktu Tersedianya Jasa Sosialisasi,Informasi,Publikasi dan Kehumasan SKPD		1 Kegiatan	12 Bulan	100,000,000.00	2 Jenis		-	2 Jenis	12 Bulan	-	36 Bulan	100,000,000.00		
			Penyediaan Jasa Adminstrasi Kantor	Rentang Waktu Penyediaan Jasa Administrasi Kantor		.	12 Bulan	153,000,000.00	-	12 Bulan	270,000,000.00	-	12 Bulan	-	36 Bulan	423,000,000.00		
			Penyediaan Jasa Layanan Museum											348,600,000.00				
	Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah		**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR**	**Terpenuhinya Peralatan Gedung Kantor**				***1,190,000,000.00***			***1,805,350,800.00***			***1,821,456,000.00***		***4,816,806,800.00***		
			Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang Diadakan		1 Paket	39 Unit	100,000,000.00	10 Jenis	112 Unit	1,068,900,000.00	10 Jenis	50 Unit	100,000,000.00	201 Unit	1,268,900,000.00		
			Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang Diadakan		1 Paket	62 Unit	125,000,000.00	10 Jenis	12 Unit	96,000,000.00	10 Jenis	12 Unit	150,000,000.00	86 Unit	371,000,000.00		
			Pengadaan Mebeleur	Jumlah Peralatan Mebeleur yang Diadakan		1 Paket	32 Unit	150,000,000.00	5 Jenis	3 Jenis	151,250,000.00	5 Jenis	3 Jenis	1,000,000,000.00	38 Unit	1,301,250,000.00		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Luas / Unit Gedung Kantor yang Dipelihara		1 Kegiatan	5 Unit	575,000,000.00	1 Unit	2 Unit	140,704,800.00	1 Unit	3 Unit	200,000,000.00	10 Unit	915,704,800.00		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	Jumlah Mobil Jabatan yang dipelihara		1 Unit	7 Unit	70,000,000.00	7 unit	7 unit	211,456,000.00	7 unit	7 unit	211,456,000.00	21 Unit	492,912,000.00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017 (Lastari)			2018 (Lastari)			2019						
						Target (awal)	Target (Perubahan)	Pagu Rp.	Target (awal)	Target (Perubahan)	Pagu Rp.	Target (awal)	Target (Perubahan)	Pagu Perubahan Rp.	Target	Rp		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara		1 Paket	1 Unit	125,000,000.00	1 Unit	1 Unit	41,040,000.00	1 Unit	1 Unit	50,000,000.00	3 Unit	216,040,000.00		
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Jenis Kelengkapan Gedung Kantor yang di pelihara		12 Bulan	43 Unit	45,000,000.00	5 Jenis	89 Unit	96,000,000.00	5 Jenis	95 Unit	110,000,000.00	227 Unit	251,000,000.00		
	Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah		**PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR**	**Terpenuhinya Lapangan Kerja Lapangan**				***145,000,000.00***			***65,000,000.00***			***65,000,000.00***		**275,000,000.00**		
			Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya yang Diadakan		100 Stel	80 Stel	110,000,000.00	60 Stel	-	-	100 Stel	-	-	80 Stel	110,000,000.00		
			Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	Jumlah ASN yang Meningkat Kebutuhan Jasmani dan Rohaninya		1 Kegiatan	80 Orang	35,000,000.00	60 Orang	100 Orang	65,000,000.00	60 Orang	80 Orang	65,000,000.00	240 Stel	165,000,000.00		
	Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah		**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR**	**Terlaksananya Keikutsertaan Pelatihan,Dinas,Kursus,Bimtek Bagi Para Pegawai**				***320,000,000.00***			***118,636,000.00***			***114,372,400.00***		**553,008,400.00**		
			Pendidikan Dan Pelatihan Formal	Jumlah ASN yang Menikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal		1 Kegiatan	80 Orang	70,000,000.00	60 Orang	80 Orang	118,636,000.00	60 Orang	80 Orang	114,372,400.00	240 Orang	303,008,400.00		
			Pelatiahan Motivasi Berprestasi (Achievment Motivation Training - AMT)	Jumlah ASN yang Mengikuti Kegiatan AMT		1 Kegiatan	80 Orang	250,000,000.00	20 Orang		-	0		-	80 Orang	250,000,000.00		
	Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah		**PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN**	**Terwujudnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (LAKIP)**				***550,000,000.00***			**-**			**-**		**550,000,000.00**		
			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi yang dibuat		1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000.00	3 Laporan		-	3 Laporan		-	1 Dokumen	40,000,000.00		
			Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Smester yang Disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000.00	1 Laporan		-	1 Laporan		-	1 Dokumen	40,000,000.00		
			Penyusunan Rencana Kerja SKPD	Jumlah Laporan Rencana Kerja SKPD yang Disusun		1 Dokumen	1 Dokumen	130,000,000.00	3 Dokumen		-	3 Dokumen		-	1 Dokumen	130,000,000.00		
			Rapat Koordinasi pada setiap SKPD	Jumlah Kab/Kota yang Mengikuti Rapat Koordinasi		1 Kegiatan	12 Kab/Kota	300,000,000.00	1 Kegiatan		**-**	1 Kegiatan		**-**	12 Kab/Kota	300,000,000.00		
			Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Jumlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)		1 Dokumen	1 Dokumen	40,000,000.00	1 Dokumen		-	1 Dokumen		-	1 Dokumen	40,000,000.00		
			KEBUDAYAAN															
Membangun masyarakat yang berbudaya Melayu, beriman dan bertaqwa	**Lestarinya keanekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal**		**PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PELESTARIAN NILAI NILAI BUDAYA**	**Persentase pelestarian keanekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal**				***64,749,205,067.00***			**-**			**-**		**64,749,205,067.00**		
			Dialog Budaya di Televisi dan Radio	Terinformasikannya Nilai-nilai Budaya Melayu Melalui Media Elektronik Lokal		4 Kali di TV Lokal dan 4 Kali di Radio Lokal	8 Kali	220,000,000.00	-						20 Kali	220,000,000.00		
			Digitalisasi Naskah Kuno	Terpeliharanya Keaslian Naskah Kuno yang Terdapat di Museum Daerah Sang Nila Utama		1 Paket	20 Naskah Kuno	200,000,000.00	-						20 Naskah	200,000,000.00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017 (Lalu)			2018 (Ini)			2019						
						Target (awal)	Target (Perubahan)	Rupa Rp.	Target (awal)	Target (Perubahan)	Rupa Rp.	Target (awal)	Target (Perubahan)	Rupa Perubahan Rp.	Target	Rp		
			Dokumentasi Grafis dan Video Seni Tari Klasik dan Silat Klasik Melayu	Dokumentasi Seni Tari Klasik dan Silat Klasik Melayu Se Provinsi Riau		6 Seni Budaya	6 Seni Budaya	600,000,000.00	-						6 Seni Budaya	600,000,000.00		
			Dukungan Penyelenggaraan Even Budaya se Provinsi Riau	Even Budaya Se Provinsi Riau		4 Kab/Kota	4 Kab/Kota	799,300,000.00	-						4 Kab/Kota	799,300,000.00		
			Ekskavasi Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya di Eskavasi		4 Struktur Cagar Budaya	4 Struktur Cagar Budaya	800,000,000.00	-						4 Struktur Cagar Budaya	800,000,000.00		
			Festival Lancang Kuning	Suksen dan Terlaksananya 3 Kegiatan Berkesenian		6 Kegiatan	3 Kegiatan	6,000,000,000.00	-						3 Kegiatan	6,000,000,000.00		
			Festival Seni Budaya Melayu	Festival Seni Budaya Melayu		7 Event 1 Kegiatan	1 Kali Festival	10,000,000,000.00	-						1 Kali Festival	10,000,000,000.00		
			Forum Dialog Seni Taman Budaya	Mempererat Hubungan Sesama Seniman		1 Kegiatan	1 Kegiatan	400,000,000.00	-						1 Kegiatan	400,000,000.00		
			Gita Bahana Nusantara	Meningkatanya Minat Tehadap Lagu perjuangan dan lagu Daerah		1 Kegiatan	1 Kegiatan	300,000,000.00	24 Orang							300,000,000.00		
			Hari Seni Taman Budaya	Sukses dan Terlaksananya 1 Kegiatan Berkesenian		1 Kegiatan	1 Kegiatan	695,316,000.00	3 Event							695,316,000.00		
			Inventarisasi Komunitas/Kelompok/Sanggar/Group Budaya Melayu se Provinsi Riau	Terdatanya komunitas/Kelompok/Group Budaya Melayu yang ada Di Provinsi Riau		12 Kabu/Kota	12 Kabu/Kota	133,000,000.00	-						12 Kabu/Kota	133,000,000.00		
			Kajian Budaya di Provinsi Riau	Tersedianya Data Hasil Kajian/Penelitian Budaya Melayu Riau		7 Dokumen	4 Dokumen	1,987,080,000.00	-						7 Dokumen	1,987,080,000.00		
			Konservasi Cagar Budaya Bergerak	Jumlah Cagar Budaya yang di Konsrvasi			50 Cagar Budaya	550,000,000.00	-						50 Cagar Budaya	550,000,000.00		
			Konservasi Cagar Budaya Tidak Bergerak	Jumlah Cagar Budaya yang di Konsrvasi			1 Unit Bangunan Cagar Budaya	1,000,000,000.00	-						1 Unit Bangunan Cagar Budaya	1,000,000,000.00		
			Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan Tingkat SMP Se- Provinsi Riau	Terselenggaranya Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMP Se Provinsi Riau		1 Kegiatan	1 Kegiatan	350,000,000.00							1 Kegiatan	350,000,000.00		
			Lomba Karya Ilmiah Kebudayaan	Terciptanya Siswa SLTA yang Berwawasan Budaya		1 Kegiatan	1 Kegiatan	350,000,000.00	-						1 Kegiatan	350,000,000.00		
			Lomba Pantun Dikalangan Pelajar	Meningkatnya Minat Kalangan Pelajar Terhadap Pantun		1 Kegiatan	1 Kegiatan	300,000,000.00	-						1 Kegiatan	300,000,000.00		
			Lomba Puisi Tingkat Remaja se Provinsi Riau	Terlestarinya Puisi di Kalangan Remaja		1 Kegiatan	1 Kegiatan	299,250,000.00	-						1 Kegiatan	299,250,000.00		
			Media Center Budaya	Terlaksananya Kegiatan Pembuatan Media Center Taman Budaya		1 Peket	1 Peket	200,000,000.00	-						1 Peket	200,000,000.00		
			Parade Tari	Memperagakan Tari Daerah ke Tingkat Nasional		1 Kegiatan	1 Kegiatan	500,000,000.00	28 Orang							500,000,000.00		
			Partisipasi Penyelenggaraan Even Budaya se Provinsi Riau dan Luar Provinsi Riau	Terfasilitasinya Event Budaya se Provinsi Riau dan Luar Provinsi Riau		7 kali	5 Kali	1,100,000,000.00	-							1,100,000,000.00		
			Pawai Budaya Nasional	Mempromosikan Kebudayaan Melayu Riau di Luar Provinsi Riau		1 Kegiatan	1 Kegiatan	600,000,000.00	-						1 Kegiatan	600,000,000.00		
			Pelatihan Alat Musik Tradisional di Kalangan Pelajar	Pelatihan Bermain Musik Tradisional Melayu di Kalangan Pelajar		1 Pelatihan Musik Tradisional Melayu	1 Pelatihan Musik Tradisional Melayu	300,000,000.00	-						1 Pelatihan Musik Tradisional Melayu	300,000,000.00		
			Pelatihan Pemandu Museum Daerah	Terselenggaranya Pelaksanaan Pelatihan Pemandu Museum Daerah		1 Kegiatan	1 Kegiatan	300,000,000.00	-						1 Kegiatan	300,000,000.00		
			Pelatihan Tenaga Teknis Konservasi/Preparasi Museum	Tersedianya SDM yang Memadai di Museum Daerah Sang Nila Utama			1 Kegiatan	300,000,000.00	-						1 Kegiatan	300,000,000.00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2021 (Lusan)			2022 (kyad)			2023						
						Target (awal)	Target (Perubahan)	Pagu Rp.	Target (awal)	Target (Perubahan)	Pagu Rp.	Target (awal)	Target (Perubahan)	Pagu Perubahan Rp.	Target	Rp		
			Pemagaran Zona Inti Situs Cagar Budaya Candi Muara Takus	Pemugaran Situs Cagar Budaya		1 Paket	1 Paket	5,000,000,000.00	-						1 Paket	5,000,000,000.00		
			Pembuatan Film Dokumenter Tentang Koleksi Museum	Tersedianya Dokumentasi Film Tentang Koleksi Museum		1 Kegiatan	1 Film Dokumenter	200,000,000.00	-						1 Film Dokumenter	200,000,000.00		
			Pembuatan Katalog, Brosur, Kalender, Buku Panduan Museum	Tersedianya Penyusunan Katalog,Brosur,Kalender, Buku Panduan Museum		1 Paket	1 Kegiatan	350,000,000.00	-						1 Paket	350,000,000.00		
			Pembuatan Master Plan Kawasan Cagar Budaya	Jumlah Masterplan Jagar Budaya		1 Kegiatan	1 Masterplan	1,000,000,000.00	1 Dokumen							1,000,000,000.00		
			Pembuatan Pusat Kreasi Anak di Museum Daerah Sang Nila Utama	Tersedianya Pusat Kreasi Anak di Museum Sang Nila Utama		1 Paket	1 Kegiatan	200,000,000.00	-						1 Paket	200,000,000.00		
			Pembuatan Souvenir Museum Sang Nila Utama	Terlaksananya Pembuatan Souvenir Museum Daerah Sang Nila Utama		1 Paket	1 Paket	615,584,000.00	5 Jenis						1 Paket	615,584,000.00		
			Pembuatan Vitrin Penyimpanan Koleksi di Ruang Storage	Terlaksanya Pembuatan Vitrin di Ruang Storage		2 Kegiatan	1 Paket	765,258,000.00	-						1 Paket	765,258,000.00		
			Pementasan Teater Bangsawan	Lebih di Kenalnya Teater Bangsawan di Kalangan Masyarakat		1 Paket	2 Kegiatan	900,000,000.00	-						2 Kegiatan	900,000,000.00		
			Pemetaan Situs Cagar Budaya	Jumlah Peta Situs Cagar Budaya		1 Kegiatan	1 Peta	500,000,000.00	-						1 Peta	500,000,000.00		
			Pemilihan Duta Museum se Provinsi Riau dan Nasional	Terselenggaranya Pemilihan Duta Museum se-Provinsi Riau		1 Paket	1 Kegiatan	500,000,000.00	-						1 Kegiatan	500,000,000.00		
			Pemugaran Cagar Budaya	Jumlah cagarBudaya yang di Pugar		1 Kegiatan	1 Bangunan Cagar Budaya	2,200,000,000.00	-						1 Bangunan Cagar Budaya	2,200,000,000.00		
			Pendataan Kembali Koleksi Provinsi Riau di Museum Malaka	Terdata Kembali Koleksi Museum Daerah yang ada di Museum Malaka		10 Kab/Kota	1 Kegiatan	150,000,000.00	-						1 Kegiatan	150,000,000.00		
			Pendokumentasian dan Publikasi Sastra Tradisi Lisan se Provinsi Riau	Terdokumentasi dan Terpublikasikannya Sastra Tradisi Lisan se Provinsi Riau		1 Paket	10 Sastra Lisan yang di Daftarkan Ke HAKI	825,000,000.00	-						10 Sastra Lisan yang di Daftarkan Ke HAKI	825,000,000.00		
			Pendokumentasian Penyusunan dan Penotasian Lagu-Lagu Klasik Melayu	Dokumentasi Lagu Klasik Melayu		1 Paket	11 Penotasian Lagu Klasik yang di Daftarkan Ke HAKI	750,000,000.00	-						11 Penotasian Lagu Klasik yang di Daftarkan Ke HAKI	750,000,000.00		
			Pendokumentasian Seni Budaya KAT se Provinsi Riau	Terdokumentasikannya Seni Budaya KAT		7 KAT	7 KAT	550,000,000.00	7 KAT						21 KAT	550,000,000.00		
			Pendokumentasian Upacara-Upacara Adat Melayu dan Non Melayu se Provinsi Riau	Tersedianya Data Upacara Adat Melayu dan Non Melayu se Provinsi Riau		6 Kabupaten	6 Kabupaten	1,100,000,000.00							6 Kabupaten	1,100,000,000.00		
			Penetapan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau	Jumlah Cagar Budaya Bergerak yang di Tetapkan		-	30 CagarBudaya Bergerak	1,250,000,000.00	-						30 CagarBudaya Bergerak	1,250,000,000.00		
			Penetapan Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Riau	Jumlah Cagar Budaya tidak Bergerak yang di Tetapkan		-	20 Cagar Budaya Tidak Bergerak	1,250,000,000.00	20 Cagar Budaya Tidak Bergerak						60 Cagar Budaya Tidak Bergerak	1,250,000,000.00		
			Pengadaan Alat Kesenian	Terlaksananya Pembelian Alat Musik Tradisional Melayu Riau di Taman Budaya		1 Kegiatan	13 Set	2,200,000,000.00	3 Jenis							2,200,000,000.00		
			Pengadaan Koleksi Museum	Pengadaan Koleksi Museum Untuk Mengamankan, Menyelamatkan dan Melestarikan Benda Budaya		1 Paket	1 Kegiatan	591,664,000.00	-						1 Kegiatan	591,664,000.00		
			Pengadaan Peralatan Laboratorium Museum Daerah Sang Nila Utama	Tersedianya Peralatan Laboratorium Museum Daerah Sang Nila Utama		1 Paket	1 Paket	300,000,000.00	1 Paket						1 Paket	300,000,000.00		
			Pengadaan Peralatan Audio Visual dan Publikasi Museum	Tersedianya Pengadaa Peralatan Audio Visual dan Publikasi Museum		1 Kegiatan	1 Paket	170,000,000.00	-						1 Paket	170,000,000.00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017 (Lisedin)			2018 (Lanjut)			2019						
						Target (awal)	Target (Perubahan)	Pagu Rp.	Target (awal)	Target (Perubahan)	Pagu Rp.	Target (awal)	Target (Perubahan)	Pagu Perubahan Rp.	Target	Rp		
			Pengelolaan Museum Sang Nila Utama	Kelancaran Tugas-tugas Rutin Museum Daerah Sang Nila Utama Selama 1 Tahun		1 Kegiatan	1 Kegiatan	511,816,000.00	-						1 Kegiatan	511,816,000.00		
			Pengelolaan Taman Budaya	Kelancaran Tugas-tugas Rutin Museum Daerah Sang Nila Utama Selama 1 Tahun Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 53 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas UPT Dinas Budaya dan Pariwisata Provinsi Riau		1 Kegiatan	1 Kegiatan	1,403,224,000.00	-						1 Kegiatan	1,403,224,000.00		
			Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pamong Budaya se Provinsi Riau	Jumlah Pamong Budaya yang Mengikuti Workshop Peningkatan Kapasitas		1 Paket	60 Orang	275,000,000.00	-						60 Orang	275,000,000.00		
			Pengkajian Koleksi Museum Daerah Sang Nila Utama	Tersedianya Data tentang Koleksi Museum Daerah Sang Nila Utama		1 Paket	1 Paket	250,000,000.00	-						1 Paket	250,000,000.00		
			Penyelamatan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau	Jumlah Cagar Budaya Bergerak yang dilindungi			1 Cagar Budaya Bergerak	1,500,000,000.00	-						1 Kali	1,500,000,000.00		
			Penyelenggaraan Festival Permainan Rakyat se Provinsi Riau	Terinformasikannaya Permainan Rakyat se Provinsi Riau		1 Kali	1 Kali	533,202,000.00	-						1 Kali	533,202,000.00		
			Penyusunan Peta Budaya Melayu Provinsi Riau	Tersosialisasikannya ke Khasan Budaya Lokal		4 Dokumen	4 Dokumen	537,756,067.00	-						4 Dokumen	537,756,067.00		
			Perawatan Koleksi Museum Sang Nila Utama	Terlaksananya Perawatan Koleksi Museum Daerah		4 Paket	4 Paket	250,000,000.00	4 Jenis							250,000,000.00		
			Pergelaran Sastra Lisan se Provinsi Riau	Meningkatnya Produktivitas Sastra Lisan di Provinsi Riau		1 Kegiatan	1 Kegiatan	400,000,000.00	-						1 Kegiatan	400,000,000.00		
			Publikasi dan Dokumentasi Taman Budaya	Agar Kegiatan Seni Budaya di Taman Budaya Lebih Dikenal dan Terarsip dengan Baik		15 Paket	15 Paket	1,950,000,000.00	-						15 Paket	1,950,000,000.00		
			Publikasi Museum di Media Cetak dan Elektronik	Terlaksananya Poblikasi Museum pada Masyarakat		1 Kegiatan	1 Kegiatan	211,587,000.00	-						1 Kegiatan	211,587,000.00		
			Pusat Seni Anak	Menumbuh kembangkan Minat Cinta Bagi Anak-anak Terhadap Seni Budaya		1 Kegiatan	1 Kegiatan	450,436,000.00	-						1 Kegiatan	450,436,000.00		
			Registrasi dan Inventarisasi Koleksi Museum	Terlaksananya Pendataan Koleksi Museum yang Akurat		1 Kegiatan	1 Kegiatan	200,000,000.00	250 Koleksi						1 Kegiatan	200,000,000.00		
			Seminar Kebudayaan Melayu se Asia Pasifik	Jumlah Peserta Seminar Kebudayaan Melayu se Asia Pasifik		1 Kali Skala Internasional	100 Orang	1,650,000,000.00	-						100 Orang	1,650,000,000.00		
			Penyelenggaraan Silaturahim Nusantara Pantun dan Puisi II	Mempererat Hubungan Sesama Seniman Senusantara		1 Kegiatan	1 Kegiatan	450,000,000.00	-						1 Kegiatan	450,000,000.00		
			Sosialisasi Nilai-Nilai Budaya Melayu untuk Komunitas Adat Terpencil (KAT) se Provinsi Riau	Tersosialisasinya Nilai-nilai Budaya Melayu pada KAT se Provinsi Riau		200 Orang	200 Orang	510,000,000.00	-						200 Orang	510,000,000.00		
			Sosialisasi Tunjuk Ajar Melayu Riau untuk Pelajar se Provinsi Riau	Tersosialisasinya Nilai-nilai Budaya Melayu pada Pelajar se Provinsi Riau		3 x 300 Orang	300 Orang	1,585,500,000.00	-						300 Orang	1,585,500,000.00		
			Workshop Musik	-		-		300,000,000.00	-							300,000,000.00		
			Workshop Peningkatan Kapasitas Guru Muatan Lokal Budaya Melayu Riau se Provinsi Riau	Meningkatnya Jumlah Guru Muatan Lokal Budaya Melayu yangMengikuti Workshop		150 Orang	200 Orang	825,000,000.00	-						200 Orang	825,000,000.00		
			Workshop Seni Rupa	Sukses 1 Kegiatan dalam meningkatkan Produktivitas Workshop Seni Rupa		1 Kegiatan	1 Kegiatan	875,000,000.00	-						1 Kegiatan	875,000,000.00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017 (awal)			2018 (awal)			2019						
						Target (awal)	Target (Perubahan)	Rp.	Target (awal)	Target (Perubahan)	Rp.	Target (awal)	Target (Perubahan)	Rp.	Target	Rp		
			Workshop Tari di Kalangan Pelajar dan Remaja	Sukses 1 Kegiatan dalam meningkatkan Produktivitas Workshop Tari di Kalangan Pelajar dan Remaja		1 Kegiatan	1 Kegiatan	279,232,000.00	-						1 Kegiatan	279,232,000.00		
			Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Aubade Hari Besar Nasional	Kegiatan Paduan Suaran (Aubade) Peringatan Kemerdekaan R.I		1 Kegiatan	1 Kegiatan	150,000,000.00	1 Kali						1 Kegiatan	150,000,000.00		
																-		
	Meningkatnya efektivitas dan integritas pemerintah daerah		**PROGRAM PENGEMBANGAN DATA / INFORMASI**	**1. Jumlah kunjungan masyarakat ke museum 2. Jumlah penciptaan seni kreasi baru/eksperimental**				***110,000,000.00***								**110,000,000.00**		
			Partisipasi Dalam Pelaksanaan Pameran Tahunan	Keikutsertaan dalam Pameran		1 Kegiatan	1 Kegiatan	110,000,000.00							1 Kegiatan	110,000,000.00		
			KEBUDAYAAN TAHUN 2017					**69,052,205,067.00**			**4,507,355,300.00**			**5,105,828,400.00**		**78,316,788,767.00**	**18,465,600,780.89**	
Membangun masyarakat yang berbudaya Melayu, beriman dan	**Lestarinya keanekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal**		**Program Pengembangan Nilai Budaya**	**Jumlah warisan budaya yang terinventarisasi: - Warisan budaya tidak benda, - Warisan budaya benda (cagar budaya)**						**Tidak Benda : Benda :**	**7,007,338,000.00**			**17,784,850,000.00**		**24,792,188,000.00**		
			Pembuatan Master Plan Kawasan Cagar Budaya	Dokumen Master Plan Kawasan Cagar Budaya						1 Dokumen	600,000,000.00			-		600,000,000.00		
			Inventarisasi Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya yang diinventarisasi						30 Cagar Budaya	350,000,000.00					350,000,000.00		
			Penetapan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau	Jumlah Cagar Budaya Bergerak yang ditetapkan									60 Cagar Budaya	400,000,000.00		400,000,000.00		
			Penetapan Cagar Budaya Tidak Bergerak Provinsi Riau	Jumlah Cagar Budaya Tidak Bergerak yang ditetapkan						20 Cagar Budaya Tidak Bergerak	700,000,000.00			500,000,000.00		1,200,000,000.00		
			Penyelenggaraan Festival Seni Tradisi Se- Asean	Jumlah Negara yang mengikuti Festival Nilai Tradisi se ASEAN						6 Negara	800,000,000.00		6 Negara	900,000,000.00		1,700,000,000.00		
			Pendokumentasian Seni Budaya KAT Se- Provinsi Riau	Jumlah Dokumentasi Seni Budaya KAT se Provinsi Riau						7 KAT	750,000,000.00					750,000,000.00		
			Temu Karya Taman Budaya Se Indonesia	Jumlah Cabang Seni Pada Temu Karya Taman Budaya						4 Cabang Seni	387,850,000.00		4 Cabang Seni	387,850,000.00		775,700,000.00		
			Pasar Seni Taman Budaya	Jumlah Pergelaran Pasar Seni Taman Budaya						9 Pergelaran	295,510,000.00					295,510,000.00		
			Kampanye Permuseuman	Jumlah Kampanye Permuseuman						5 Kab/kota	500,000,000.00					500,000,000.00		
			Pameran Museum	Jumlah Event Yang di Ikuti						3 Event	400,000,000.00					400,000,000.00		
			Penggandaan dan Penerbitan Buku Adat dan Tradisi Melayu Riau	Jumlah Buku Adat dan Tradisi Melayu Riau						10 Judul Buku	671,128,000.00					671,128,000.00		
			Pendokumentasian Nilai-Nilai Tradisi Budaya Melayu Se- Provinsi Riau	Jumlah pendokumentasian Nilai-nilai tradisi Budaya Melayu se provinsi Riau						4 kabupaten/ kota	800,000,000.00					800,000,000.00		
			Pembinaan Kearifan Lokal Khasanah Budaya Pekaian Daerah Riau	Jumlah peserta yang mengikuti pembinaan kearifaan lokal terhadap khasanah budaya pakaian daerah						48 org	200,000,000.00					200,000,000.00		
			Pembinaan Tunjuk Ajar Melayu Riau Untuk Pelajar Se- Provinsi Riau	Jumlah Peserta Pembinaan Tunjuk Ajar Melayu Riau pada didik SMP, SMA, SMK se Provinsi Riau						200 orang	546,850,000.00					546,850,000.00		
			Festival Budaya Melayu	Jumlah Even Budaya Melayu						6 Even	6,000,000.00		6 Even	5,000,000,000.00		5,006,000,000.00		
			Penyelamatan Cagar Budaya Bergerak Provinsi Riau	Jumlah Cagar Budaya Bergerak yang dilindungi									1 Cagar Budaya Bergerak	500,000,000.00		500,000,000.00		
			Konservasi Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya Bergerak yang dikonservasi									200 Cagar Budaya Bergerak	300,000,000.00		300,000,000.00		
			Ekskavasi Cagar Budaya	Jumlah Cagar Budaya di Eskavasi									1 Cagar Budaya	300,000,000.00		300,000,000.00		
			Inventarisasi dan Dokumentasi Cagar Budaya Bergerak	Jumlah Cagar Budaya Bergerak yang Terdokumentasi dan diinventarisir									300 Cagar Budaya	300,000,000.00		300,000,000.00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2023 (Lalu)			2024 (Ini)			2025						
						Target (awal)	Target (Perubahan)	Pagu Rp.	Target (awal)	Target (Perubahan)	Pagu Rp.	Target (awal)	Target (Perubahan)	Pagu Perubahan Rp.	Target	Rp		
			Inventarisasi dan Dokumentasi Cagar Budaya Tidak Bergerak	Jumlah Cagar Budaya Tidak Bergerak yang Terdokumentasi dan diinventarisir									100 Cagar Budaya	300,000,000.00		300,000,000.00		
			Pemetaan Situs Cagar Budaya	Jumlah Peta Situs Cagar Budaya									30 Situs	300,000,000.00		300,000,000.00		
			Digitalisasi Naskah Kuno	Terpeliharanya Keaslian Naskah Kuno yang Terdapat di Museum Daerah Sang Nila Utama									10 Naskah	600,000,000.00		600,000,000.00		
			Pameran Seni Media Se-Asean	Jumlah Even Pameran									1 Event	500,000,000.00		500,000,000.00		
			Promosi Dan Publikasi Budaya	Jumlah Event Promosi dan Publikasi									1 Event	700,000,000.00		700,000,000.00		
			Diplomasi Budaya	Jumlah Diplomasi Budaya yang Dilaksanakan									10 Kali	700,000,000.00		700,000,000.00		
			Workshop Rekayasa Adat Budaya dan Tradisi Se-Provinsi Riau	Jumlah orang mengikuti workshop									100 Orang	500,000,000.00		500,000,000.00		
			Pengkajian Koleksi Museum Daerah Sang Nila Utama	Tersedianya Data tentang Koleksi Museum Daerah Sang Nila Utama									250 Koleksi	250,000,000.00		250,000,000.00		
			Sosialisasi Nilai-nilai Budaya Melayu Riau	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi Nilai-nilai Budaya Melayu Riau									100 Orang	550,000,000.00		550,000,000.00		
			Pendokumentasian Seni Budaya Melayu Riau	Jumlah dokumen Seni Budaya Melayu Riau									5 Dokumen	550,000,000.00		550,000,000.00		
			Penerbitan Buku Adat dan Tradisi Melayu Riau	Jumlah Buku Adat dan Tradisi Melayu Riau yang diterbitkan									500 Eks	300,000,000.00		300,000,000.00		
			Kajian Budaya Melayu Riau	Jumlah Kajian Budaya Melayu Riau							-		10 Kajian	550,000,000.00		550,000,000.00		
			Sejarah tari Klasik Melayu Riau	Jumlah Dokumen Sejarah Tari Kalsik Melayu Riau									1 Dokumen	300,000,000.00		300,000,000.00		
			Penyusunan dan Rancangan Museum Tematik di Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Museum Tematik									1 Dokumen	300,000,000.00		300,000,000.00		
			Kajian Sumber Sejarah Riau	Jumlah Dummy Sumber Sejarah Riau									1 Dummy	300,000,000.00		300,000,000.00		
			Pemugaran Pagar Jail Belanda	Panjang Pemugaran Pagar Jail Belanda									250 M	700,000,000.00		700,000,000.00		
			Pembinaan Warisan Budaya Tak Benda Provinsi Riau	Jumlah Kab.kota yang menjadi tempat pembinaan Warisan Budaya Tak Benda Provinsi Riau									12 Kab/Kota	750,000,000.00		750,000,000.00		
			Cetak buku sastra lisan Riau	Jumlah buku sastra lisan Riau									1000 Eks	400,000,000.00		400,000,000.00		
			Inventarisasi dan Pendaftaran HAKI dan WBTB Karya Seni Budaya se Provinsi Riau	Jumlah Inventarisasi dan Pendaftaran HAKI dan WBTB Karya Seni Budaya se-Provinsi Riau									40 Haki 10 WBTB	400,000,000.00		400,000,000.00		
			Pengenalan Baju Daerah	Jumlah Peserta dari Kabupaten/kota									12 Kab/Kota	97,000,000.00		97,000,000.00		
			Penyusunan Peta Budaya Melayu Provinsi Riau	Tersosialisasikannya ke Khasan Budaya Lokal									2 Dokumen	150,000,000.00		150,000,000.00		
Membangun masyarakat yang berbudaya Melayu, beriman dan bertaqwa	**Lestarinya keanekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal**		**Program Pengelolaan Kekayaan Budaya**	**1. Jumlah kunjungan masyarakat ke museum 2. Jumlah penciptaan seni kreasi baru/ eksperimental**						**Kunjungan Karya seni**	**4,798,158,000.00**			**6,250,000,000.00**		**11,048,158,000.00**		
			Perawatan Koleksi Museum Sang Nila Utama	Jumlah Jenis Koleksi Yang Terawat di Museum						4 Jennis Koleksi	228,232,000.00		4 Jenis	350,000,000.00		578,232,000.00		
			Pembuatan Souvenir Museum Sang Nila Utama	Jumlah Jenis Souvenir						5 Jenis	230,764,000.00		3 Jenis	350,000,000.00		580,764,000.00		
			Registrasi dan Inventarisasi Koleksi Museum	Jumlah Registrasi dan Inventarisasi Koleksi Museum						250 Koleksi	53,806,000.00		250 Koleksi	100,000,000.00		153,806,000.00		
			Direktori Organisasi Budaya Melayu Riau	Jumlah Organisasi Budaya						40 Organisasi Budaya Melayu	450,000,000.00					450,000,000.00		
			Pembuatan Film Dokumenter Sejarah Perjuangan di Pekanbaru	Jumlah Film Dokumenter Sejarah Perjuangan di Pekanbaru						1 Film Dokumenter	900,000,000.00					900,000,000.00		
			Lawatan Sejarah Budaya Untuk Pelajar Se- Provinsi Riau	Jumlah Peserta Lawatan Sejarah Budaya untuk Pelajar						50 Pelajar	385,356,000.00					385,356,000.00		
			Pengembangan Nilai dan Geografi Sejarah	Jumlah Dokumen Peta Sebaran Nilai dan Geografi Sejarah						1 Dokumen	400,000,000.00					400,000,000.00		
			Penyusunan dan Rancangan Museum Tematik di Provinsi Riau	Jumlah Dokumen Museum Tematik						2 Dokumen	1,100,000,000.00					1,100,000,000.00		
			Kajian Sumber Sejarah Riau	Jumlah Dummy Sumber Sejarah Riau						1 Dummy	750,000,000.00					750,000,000.00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017 (Lalu)			2018 (Ini)			2019						
						Target (awal)	Target (Perubahan)	Pagu Rp.	Target (awal)	Target (Perubahan)	Pagu Rp.	Target (awal)	Target (Perubahan)	Pagu Perubahan Rp.	Target	Rp		
			Lomba Cerdas Cermat Kebudayaan Tingkat SLTP Se- Provinsi Riau	Jumlah Peserta Lomba Cerdas Cermat Tingkat SMP se- Provinsi Riau						48 orang	300,000,000.00		48 orang	400,000,000.00		700,000,000.00		
			Penataan Story Line	Jumlah Koleksi yang Ditata									4 Jenis	1,500,000,000.00		1,500,000,000.00		
			Workshop Penulisan Skenario Film Sejarah Se Provinsi Riau	Jumlah orang yang mengikuti Workshop Penulisan Skenario Film Sejarah Se Provinsi Riau									60 Orang	400,000,000.00		400,000,000.00		
			Festival Film Dokumenter se Provinsi Riau	Jumlah Film Dokumenter se Provinsi Riau									24 Film	600,000,000.00		600,000,000.00		
			Pemutaran Film Dokumenter se Provinsi Riau	Jumlah Kab.kota yang menjadi tujuan pemutaran Film Dokumenter Se-Provinsi Riau									12 Kab/Kota	450,000,000.00		450,000,000.00		
			Lomba Karya Ilmiah Kebudayaan	Terciptanya Siswa SLTA yang Berwawasan Budaya									48 Orang	200,000,000.00		200,000,000.00		
			Kampanye Permuseuman	Jumlah Kampanye Permuseuman									5 Kab/kota	500,000,000.00		500,000,000.00		
			Pameran Museum	Jumlah Event Yang di Ikuti									5 Event	700,000,000.00		700,000,000.00		
			Lomba cipta cerpen antar pelajar tingkat SLTA se Indonesia	Jumlah orang yang mengikuti Lomba Cipta Cerpen antar Pelajar tingkat SLTA se-Indonesia									100 Orang	200,000,000.00		200,000,000.00		
			Sayembara Puisi antar pelajar tingkat SLTA dan Umum se Indonesia	Jumlah Orang yang mengikuti Sayembara Puisi antar pelajar tingkat SLTA dan Umum se Indonesia									100 Orang	300,000,000.00		300,000,000.00		
			Musikalisasi Puisi antar pelajar tingkat SLTA se Provinsi Riau	Jumlah group Musikalisasi Puisi antar pelajar tingkat SLTA se Provinsi Riau									12 Group	200,000,000.00		200,000,000.00		
																-		
Membangun masyarakat yang berbudaya Melayu, beriman dan bertaqwa	**Lestarinya keanekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal**		**Program Pengelolaan Keraqaman Budaya**	**1. Jumlah pagelaran seni budaya di taman budaya (pagelaran) 2. Jumlah pagelaran budaya yang difasilitasi**						**Pagelaran Seni dan Budaya**	**8,019,093,479.00**			**7,375,787,000.00**		**15,394,880,479.00**		
			Pengadaan Alat Kesenian								1,750,000,000.00					1,750,000,000.00		
			Pameran Pagelaran Seni Se-Sumatera	Jumlah Cabang Seni Event Pameran dan Pergelaran Seni se Sumatera						4 Cabang Seni	322,000,000.00		4 Cabang Seni	322,000,000.00		644,000,000.00		
			Gita Bahana Nusantara	Jumlah Kab/kota Peserta Gita Bahana Nusantara						12 Kab/kota	195,000,000.00		12 Kab/kota	195,000,000.00		390,000,000.00		
			Hari Seni Taman Budaya	Jumlah Event Hari Seni Taman Budaya						3 Event	430,600,000.00					430,600,000.00		
			Parade Tari	Jumlah Kab/kota Yang Mengikuti Parade Tari						12 Kab/kota	396,700,000.00					396,700,000.00		
			Pengelolaan Taman Budaya								-					-		
			Penyelenggaraan dan Pelaksanaan Aubade Hari Besar Nasional	Jumlah Peserta Paduan Suara Dalam Rangka Peringatan kemerdekaan R.I						150 Orang	129,702,000.00		150 Orang	129,702,000.00		259,404,000.00		
			Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	Ruang Data Center dan Mini Main Frame Server serta Perlengkapan Jaringan						50 Persen	1,178,820,000.00					1,178,820,000.00		
			Lomba Publikasi Budaya Melayu	Jumlah Lomba Budaya Melayu						3 Lomba Budaya Melayu	497,392,000.00					497,392,000.00		
			Diklat Peningkatan Kapasitas Pelaku Publikasi Budaya Melayu	Jumlah Pelaku Publikasi Budaya Melayu						1 Kegiatan	350,000,000.00					350,000,000.00		
			Pemilihan Duta Budaya Melayu	Tersedianya Duta Budaya Melayu Riau						24 Orang	653,200,000.00					653,200,000.00		
			Sistem Informasi Pusat Jaringan Kerjasama Pelestarian Budaya Melayu	Pengembangan Informasi Pusat Jaringan Kerjasama Pelestarian Budaya Melayu						12 Kab/Kota	-					-		
			Dialog Budaya di Televisi dan Radio	Tersosialisasinya Nilai-nilai Budaya Melayu di Masyarakat						6 Kali	210,000,000.00		4 Kali di TV Lokal dan 4 Kali di Radio Lokal	300,000,000.00		510,000,000.00		
			Media Center Budaya								-					-		
			Publikasi dan Promosi Budaya	Jumlah Buku Kuliner dan Kebudayaan Melayu Tradisional Melayu Riau						3000 Buku	210,000,000.00					210,000,000.00		
			Sayembara Penulisan Novel Melayu Se- Provinsi Riau	Jumlah Even Sayembara Penulisan Novel Melayu						1 Even Sayembara Penulisan Novel Melayu	162,310,479.00					162,310,479.00		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan									Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						2017 (tunda)			2018 (tunda)			2019						
						Target (awal)	Target (Perubahan)	Pagu Rp.	Target (awal)	Target (Perubahan)	Pagu Rp.	Target (awal)	Target (Perubahan)	Pagu Perubahan Rp.	Target	Rp		
			Festival Sastra Lisan Se- Provinsi Riau	Jumlah Group Sastra Lisan						5 Group Sastra Lisan	184,300,000.00					184,300,000.00		
			Partisipasi Penyelenggaraan Even Budaya se Provinsi Riau dan Luar Provinsi Riau	Jumlah Jenis Even Budaya						3 Even Budaya	1,349,069,000.00					1,349,069,000.00		
			Pusat Pelatihan Seni Untuk Anak-anak	Jumlah Jenis Pelatihan Cabang Seni						2 Jenis Pelatihan Cabang Seni	-					-		
			Penyusunan Peta Budaya Melayu Provinsi Riau	Jumlah Peta Budaya Melayu Riau						3 Daerah/ Kabupaten	0					-		
			Peningkatan Kapasitas Publikasi Budaya Melayu	Jumlah Penyebaran Publikasi Budaya Melayu						1 Kegiatan	,					-		
			Pagelaran Keragaman Seni Budaya	Jumlh Pagelaran seni									6 Cabang Seni	700,000,000.00		700,000,000.00		
			Junjung Seni Taman Budaya	Jumlah Event Pergelaran									3 Event	726,110,000.00		726,110,000.00		
			Pergelaran Musik Tradisional Riau	Jumlah event Pergelaran Musik Tradisonal									1 Event	300,000,000.00		300,000,000.00		
			Pergelaran Tari Klasik Melayu se Provinsi Riau	Jumlah event Pergelaran Tari Klasik									1 Event	250,000,000.00		250,000,000.00		
			Fasilitasi pergelaran seni	Jumlah Pergelran Seni									20 Pergelaran	600,000,000.00		600,000,000.00		
			Laman Cipta Sastra	Jumlah Karya Sastra dan Tulisan									12 Karya	156,250,000.00		156,250,000.00		
			Haul Para Penyair Riau	Jumlah Penyair Riau									5 Sastrawan	10,000,000.00		10,000,000.00		
			Tandang Sastra	Jumlah Sekolah yang mendapat Pendidikan Sastra									10 Sekolah	240,750,000.00		240,750,000.00		
			Lomba Baca Puisi (Siswa dan Guru) Se Provinsi Riau	Jumlah Perserta Baca Puisi									100 Orang	121,750,000.00		121,750,000.00		
			Pelatihan Sastra (Untuk Siswa dan Guru) se Provinsi Riau	Jumlah Peserta Pelatihan Satra									100 Orang	71,250,000.00		71,250,000.00		
			Silahturahmi Sastra Riau (Antologi Sastra Riau)	Jumlah Buku Antologi Sastra									1 buku	422,000,000.00		422,000,000.00		
			Rarak Cipta Musik Se Provinsi Riau	Jumlah Karya Musik Baru									12 Karya	500,000,000.00		500,000,000.00		
			Pelatihan Musik (Untuk Siswa dan Guru) Se Provinsi Riau	Jumlah Siswa dan Guru yang mengikuti Pelatihan Musik									100 Orang	250,000,000.00		250,000,000.00		
			Pingat Kejohanan Tari se Riau	Jumlah Karya Tari Baru									12 Karya	500,000,000.00		500,000,000.00		
			WorkShop Tari se Provinsi Riau	Jumlah Seniman Tari Yang Manghasilkan Karya Seni Tari									10 Orang	150,000,000.00		150,000,000.00		
			Kompetisi Tari Trio	Jumlah Karya Group Tari Trio yang Mengikuti Kompetisi									12 Karya	200,000,000.00		200,000,000.00		
			Gelora Teater Se Provinsi Riau	Jumlah Karya yang Dihasilkan Seniman Teater									12 Karya	409,675,000.00		409,675,000.00		
			Sayembara Film Pendek	Jumlah Hasil Karya Film yang Dihasilkan									12 Karya	256,300,000.00		256,300,000.00		
			Bentang Karya Seni Rupa	Jumlah Karya Seni Rupa yang Dihasilkan									15 Karya	365,000,000.00		365,000,000.00		
			Workshop Seni Rupa (untuk Siswa dan Guru)	Jumlah Siswa dan Guru yang Memahami Seni Rupa									100 Orang	200,000,000.00		200,000,000.00		
			TOTAL KEBUDAYAAN					**69,052,205,067.00**			**24,331,944,779.00**			**36,516,465,400.00**		**129,552,015,246.00**		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS KEBUDAYAAN YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam tiga tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Provinsi Riau.

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan Provinsi Riau, maka dapat disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) yang akan dicapai dalam kurun waktu 2017-2019 yaitu :

1. Program Pelestarian Budaya (sebelum revisi Renstra)

Program pelestarian budaya ini dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian tujuan ke 8, yaitu Terwujudnya Penerapan Nilai-Nilai Luhur Budaya Indonesia yang mencerminkan Jati Diri Bangsa Bermartabat, dengan sasaran: 1) meningkatnya pelestarian keanekaragaman budaya melayu dan kearifan lokal, 2) Meningkatnya Sarana dan Prasarana Kebudayaan, 3) meningkatnya perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan/cagar budaya (CB) dan 4) terwujudnya pengembangan promosi dan Informasi kebudayaan. Indikator kinerja program pelestarian budaya yang sesuai dengan RPJMD adalah: 1) Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan; 2) Jumlah Komunitas Adat Terpencil yang terinventarisasi/terdata; 3) Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya; 4) Penyelenggaraan Festival Seni Budaya tingkat Nasional dan Internasional. Program ini dilaksanakan pada tahun 2016 sedangkan pada tahun 2017 program ini menjadi pengembangan dan pelestarian nilai budaya sedangkan di tahun 2018 program ini dipecah menjadi 3 bagian. Yaitu program Pengembmangan Nilai Budaya, Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dan Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

2. Program Pengembangan dan Pelestarian Nilai Budaya (Tahun 2017)

Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Meningkatnya Karya Seni Budaya Melayu yang di akui dan terdaftar ke Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Serta meningkatnya Jumlah Sekolah yang menerapkan kurikulum muatan lokal berbasis budaya melayu dengan indicator kinerja utamanya Jumlah Karya Cipta Seni Budaya Melayu yang dihasilkan (HAKI Karya Seni) dan Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah).

3. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya (Tahun 2018)

Keberhasilan Program Pengelolaan Kekayaan Budaya ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama yaitu Jumlah kunjungan masyarakat ke museum dan Jumlah penciptaan seni kreasi baru/eksperimental

4. Program Pengelolaan Keragaman Budaya (Tahun 2018)

Program ini diukur dengan indikator kinerja utama Jumlah pagelaran seni budaya di taman budaya (pagelaran dan Jumlah pagelaran/komunitas budaya yang difasilitasi

5. Program Pengembangan Nilai Budaya

Program Pengembangan Nilai Budaya, Keberhasilan program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama seperti Jumlah warisan budaya yang terinventarisasi, Warisan budaya tidak benda dan Warisan budaya benda (cagar budaya)

Secara rinci target capaian Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang terkait dengan tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Riau tahun 2014-2018 adalah sebagaimana pada table 7.1 di bawah ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Dinas Kebudayaan yang
Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1.	**Jumlah Benda, Situs Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan**							
a.	Benda Cagar Budaya Bergerak	0	0	25	25	25	25	100
b.	Benda Cagar Budaya Tidak Bergerak	0	0	1	1	1	1	4
c.	Situs Cagar Budaya	0	0	1	1	1	1	4
d	Kawasan Cagar Budaya	0	0	1	1	1	1	4
2.	**Jumlah Komunitas Adat Terpencil yang terinventarisasi/terdata**	0	0	1	1	1	1	4
3.	**Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni Budaya**	0	0	1	1	1	1	4
4.	**Penyelenggaraan Festival Seni Budaya**							
	1. Nasional	0	3	3	3	3	3	15
	2. Internasional	0	0	1	0	0	1	2
5.	**Jumlah kunjungan masyarakat ke museum**	na	na	na	30.000	40.000	50.000	120.000
	Jumlah penciptaan seni kreasi baru/eksperimental	na	na	na	na	na	na	
6.	**Jumlah Sekolah yang menerapkan Kurikulum Muatan Lokal berbasis Budaya Melayu sesuai Standar (Sekolah)**	na	na	na	na	50	150	200

BAB VIII
P E N U T U P

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini merupakan langkah awal peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan Provinsi Riau dalam tahun 2017-2019. Dan merupakan acuan dan panduan dalam melaksanakan dan menembangkan program serta kegiatan yang akan dilakukan oleh seluruh jajaran di lingkungan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau Keberhasilan pelaksanaannya sangat tergantung pada kontribusi berbagai *stakeholders* serta dengan dukungan SDM Aparatur Dinas Kebudayaan Provinsi Riau yang berkualitas dan memiliki integritas dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya. Sumber daya manusia yang berkualitas diharapkan juga memiliki jiwa *enterpreneurship* yang bisa bekerjasama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak terkait terutama dalam mendorong peran serta masyarakat secara aktif.

Seiring dengan Visi Gubernur Provinsi Riau yang ingin mewujudkan Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera dan berdaya saing tinggi, terhapusnya kemiskinan serta tersedianya lapangan kerja maka dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang akan datang diperlukan dukungan dan peran aktif dari semua pihak untuk mewujudkan keberhasilan usaha dalam menciptakan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat, terhapusnya kemiskinan serta tersedianya lapangan kerja di Provinsi Riau.

Dalam implementasinya, rencana strategis ini memerlukan komitmen dari seluruh jajaran organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Untuk memperoleh komitmen yang tinggi, pemahaman bersama (*shared vision*) akan visi, misi dan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai Dinas Kebudayaan Provinsi Riau pada kurun waktu 2017-2018 sangat diperlukan. Oleh karenanya, sebagai tindak lanjut, secara berjenjang menurut hirarki struktur organisasi Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Semoga Rencana Strategis yang telah disusun ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dapat menjadi acuan dalam implementasinya. Rencana strategis ini akan berubah bila diperlukan seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kondisi sosial, ekonomi dan politik, yang mungkin terjadi baik dalam skala provinsi, nasional maupun internasional.

NIHIL